

TAHUN
2023

**LAPORAN KINERJA
PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
S.D TRIWULAN II TAHUN 2023**

NOMOR OT.04/LPP- 226/PW12/6/2023

TANGGAL 27 JUNI 2023



Nomor : OT.04/LPP-226/PW12.6/2023 27 Juni 2023
Lampiran : Empat Eksemplar
Hal : Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta s.d. Triwulan II Tahun 2023

Yth. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta

Berikut kami sampaikan Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta s.d. triwulan II tahun 2023.

1. Dasar Penugasan

- Surat Sekretaris Utama Nomor OT.04/S-933/SU/01/2023 tanggal 13 Juni 2023;
- Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP D.I.Yogyakarta Nomor PE.11.02/ST-434/PW12/6/2022 tanggal 20 Juni 2023.

2. Pencapaian Target *Outcome* sesuai Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2023, Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta mempunyai 6 sasaran kegiatan dengan 40 indikator kinerja kegiatan (IKK) . Sampai dengan triwulan II tahun 2023, capaian kinerja diuraikan sebagai berikut:

A. Sasaran Kegiatan I: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah

1) IKK: Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi

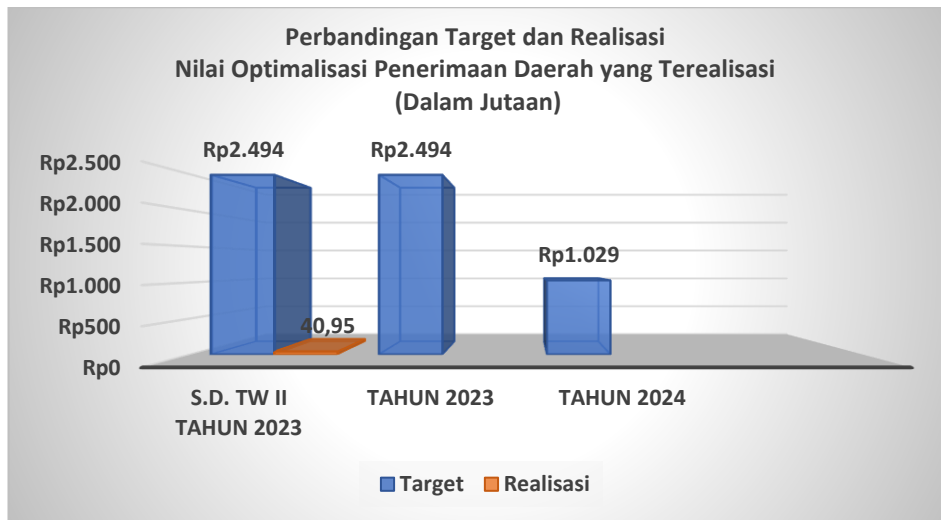
Realisasi Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi s.d. triwulan II tahun 2023 sebesar Rp40.950.388,70.

Target IKK “Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi” tahun 2023 sebesar Rp2.494.000.000,00. Sampai dengan triwulan II tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp40.950.388,70 atau 1,64% dari target s.d. triwulan II tahun 2023 maupun tahun 2023 sebesar Rp2.494.000.000,00. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra 2020-2024 telah tercapai sebesar 3,98% dari target sebesar Rp1.029.000.000,00.



IKK “Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi” diukur dengan jumlah kurang bayar penerimaan daerah (pajak dan retribusi) yang sudah disetorkan/ditetapkan atas hasil kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta.

Perbandingan target dan realisasi IKK “Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi” dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Agenda Pengawasan Prioritas Tahun 2023 yang mendukung realisasi “Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah” yaitu Pengawasan atas Optimalisasi PAD dengan rincian penugasan sebagai berikut:

- Evaluasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman dengan nilai optimalisasi PAD sebesar Rp419.172.695,00;
- Evaluasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gunungkidul dengan nilai optimalisasi PAD sebesar Rp614.407.382,00.



Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam pengumpulan pendapatan asli daerah berupa pajak yaitu:

- a) Pemerintah Kabupaten Gunungkidul belum mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah secara utuh, yaitu belum menerapkan sanksi atas wajib pajak maupun pelaku usaha yang melanggar. BPKAD belum melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja selaku penegak Peraturan Daerah;
- b) BPKAD Kabupaten Gunungkidul masih menerima laporan dan pembayaran pajak dibawah Rp300.000,00, yaitu sebanyak 275 restoran/rumah makan/warung makan. Batas kewajiban melapor dan membayar Pajak Restoran adalah omset minimal sebesar Rp3.000.000,00 per bulan.

Pemerintah daerah telah berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil Evaluasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan meminta pihak-pihak terkait menyetorkan pajak sesuai laporan tersebut. Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta akan melakukan Monitoring Tindak Lanjut atas Evaluasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Pemerintah Kabupaten Sleman.

2) IKK: Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah

Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara/ Daerah s.d. triwulan II tahun 2023 sebesar Rp226.385.429.002,00.

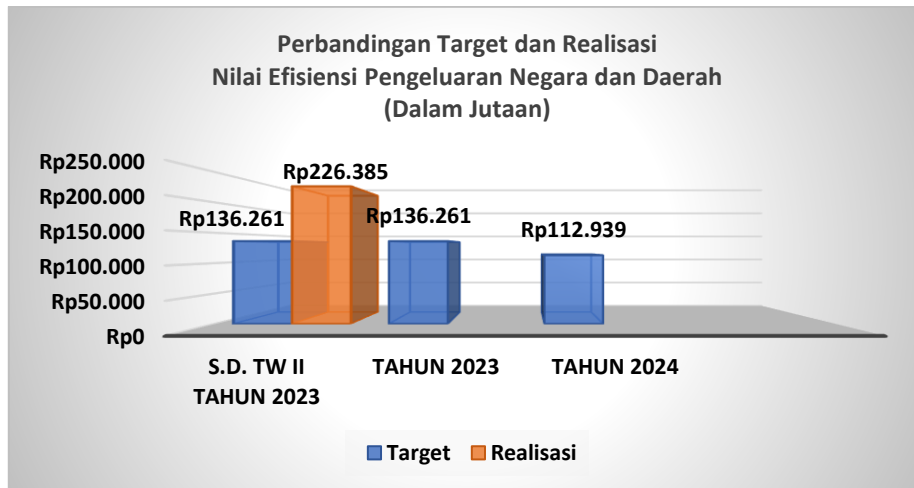
Target IKK “Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah” tahun 2023 sebesar Rp136.261.000.000,00. Sampai dengan triwulan II tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp226.385.429.002,00 atau 166,14% (maksimal 120%) dari target s.d. triwulan II tahun 2023 maupun tahun 2023 sebesar Rp136.261.000.000,00.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra 2020-2024 sebesar Rp112.939.000.000,00, maka capaian nilai efisiensi pengeluaran negara/daerah sampai dengan triwulan II tahun 2023 telah tercapai 200,21% (maksimal 120%).

IKK “Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah” diukur dengan nilai pengurangan/pengalihan rencana belanja proyek/program/kegiatan yang tidak tepat.

Perbandingan target dan realisasi IKK “Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah” dapat dilihat pada grafik dibawah ini:





Agenda Pengawasan Prioritas yang mendukung realisasi "Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah" sebesar Rp226.114.901.902,00

Nilai tersebut belum termasuk realisasi dari bidang investigasi, dimana bidang investigasi belum ada realisasi karena penugasan terkait audit penyesuaian harga/ekskalasi masih berlangsung.

3) IKK: Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah

Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah Sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebesar Rp684.563.086,29.

Target IKK "Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah" pada tahun 2023 adalah sebesar Rp56.684.000.000,00 dan target s.d. triwulan II tahun 2023 sebesar Rp230.000.000,00. Sampai dengan triwulan II tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp684.563.086,29 atau 297,64% (maksimal 120%) dari target sebesar

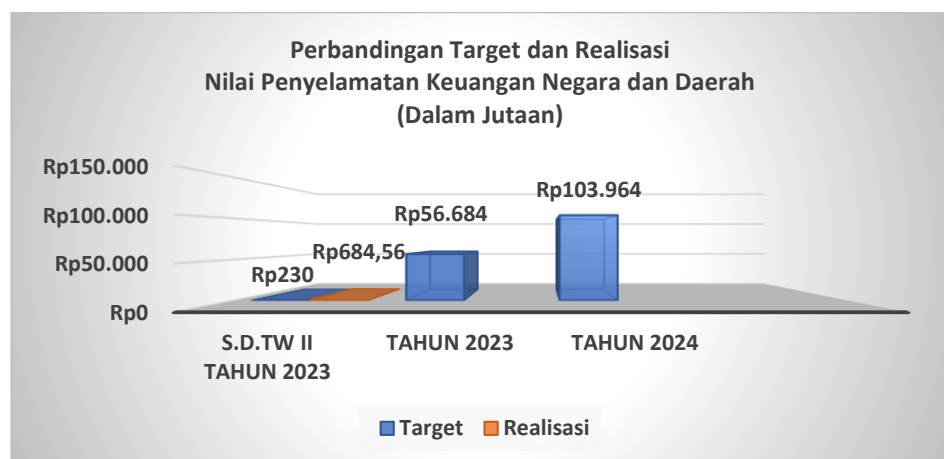


Rp230.000.000,00, dan telah tercapai 1,20% dari target tahun 2023 sebesar Rp56.684.000.000,00.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra 2020-2024 sebesar Rp103.964.000.000,00 maka capaian nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah s.d. triwulan II tahun 2023 telah tercapai 0,66%.

IKK “Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah” diukur dengan nilai belanja yang dikembalikan ke Kas Negara/Daerah termasuk denda dari hasil pengawasan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta dan nilai aset yang dipulihkan.

Perbandingan target dan realisasi “Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah” dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Agenda Pengawasan Prioritas yang mendukung realisasi “Nilai Penyelamatan Keuangan Negara” sebesar Rp684.563.086,29, yaitu:

- a. Pengawasan atas Pengendalian Kecurangan dan Hambatan Kelancaran Pembangunan berupa:
 - Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun Anggaran 2020 serta Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 pada dinas di salah satu pemda di wilayah kerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta sebesar Rp170.979.349,00;
 - Audit PKKN Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dan Dana Desa pada satu Kalurahan di Kabupaten Bantul TA 2018 dan 2019 sebesar Rp230.604.055,00.



- b. Audit atas Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri sebesar Rp265.547.682,29;
- c. Pengawasan Bantuan Operasional Sekolah sebesar Rp17.432.000,00.

Faktor pendukung atas tercapainya target tersebut antara lain:

- a. Kerja sama yang baik dengan APH atau pihak/instansi terkait;
- b. SDM yang mempunyai kapasitas dan kompetensi terhadap pengadaan barang/jasa sehingga dapat dihasilkan penyelamatan keuangan negara.

B. Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional

1) IKK: Jumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang Tercapai Sesuai

Jumlah Proyek Strategis Nasional yang Tercapai Sesuai Target sampai dengan triwulan II tahun 2023 sejumlah 2 (dua) PSN.

Target Target IKK “Jumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang Tercapai Sesuai Target” pada tahun 2023 sebanyak 1 (satu) PSN. Sampai dengan triwulan II tahun 2023 sudah terealisasi sebanyak 2 (dua) PSN atau 200,00% (maksimal 120%) dari target tahun 2023 maupun s.d. triwulan II tahun 2023 sebanyak 1 (satu) PSN.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra 2020-2024 sebanyak 1 (satu) PSN maka capaian “Jumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang Tercapai Sesuai Target” sampai dengan triwulan II tahun 2023 telah tercapai 200,00% (maksimal 120%).

IKK “Jumlah Proyek Strategis Nasional yang tercapai sesuai target” diukur dengan jumlah PSN yang tercapai targetnya sesuai target kinerja pada dokumen perencanaan yang sah.

Perbandingan target dan realisasi “Jumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang



Tercapai Sesuai Target” dapat dilihat pada tabel berikut:



• UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1:
 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
 • Silakan pindai kode QR dengan menggunakan aplikasi resmi dari BSR.E untuk memastikan bahwa dokumen ini adalah asli.

PSN yang tercapai sesuai target yaitu:

- PSN Pembangunan Infrastruktur Bandar Udara Internasional Yogyakarta pada PT. Angkasa Pura I (Persero).
Status PSN Pembangunan Infrastruktur Bandar Udara Internasional Yogyakarta adalah selesai konstruksi dan dimanfaatkan tepat waktu sesuai dengan yang direncanakan.
- PSN Pembangunan Kereta Api Akses Bandara Baru Yogyakarta pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah.
Status PSN Pembangunan Kereta Api Akses Bandara Baru Yogyakarta adalah selesai konstruksi dan dimanfaatkan tepat waktu sesuai dengan yang direncanakan.

Agenda Pengawasan Prioritas yang mendukung realisasi “Proyek Strategis Nasional yang Tercapai Sesuai Target” yaitu Pengawasan Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan triwulanan sebagai berikut:

- Reviu Tata Kelola Atas Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan Bandar Udara Internasional Yogyakarta (Bandar Udara Baru Yogyakarta – Kulon Progo) Triwulan II Tahun 2023 pada PT Angkasa Pura I (Persero).
- Reviu atas Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan Kereta Api Akses Bandara Baru Yogyakarta - Kulon Progo Triwulan II Tahun 2023.

Faktor pendukung atas tercapainya target tersebut, yaitu BPKP secara rutin melaksanakan penugasan reviu PSN setiap triwulan serta memberikan rekomendasi perbaikan.

2) IKK: Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang Diselesaikan

Belum ada Realisasi Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang Diselesaikan s.d. triwulan II tahun 2023.

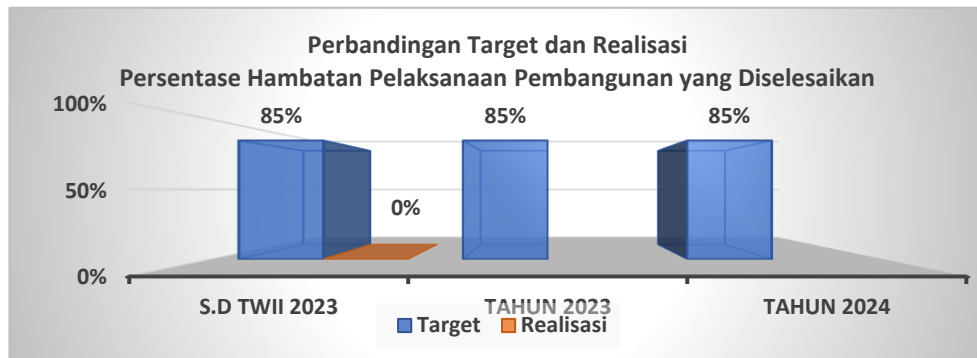
Target IKK “Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang Diselesaikan” pada tahun 2023 adalah sebesar 85,00%. Sampai dengan triwulan II tahun 2023 belum ada realisasi.

Hambatan kelancaran pembangunan (HKP) adalah sebuah kondisi dimana proses pembangunan tidak dapat mencapai *output*, *outcome*, dan manfaat yang ditetapkan karena adanya masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan kewenangan para pihak terkait.

Pencapaian indikator kegiatan ini diukur dengan menghitung jumlah Laporan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (LEHKP) yang kesepakatannya terlaksana dibandingkan dengan total penugasan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (EHKP).



Perbandingan target dan realisasi “Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang Diselesaikan” dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Sampai dengan triwulan II tahun 2023, target belum tercapai disebabkan belum ada permintaan terkait penugasan evaluasi hambatan kelancaran pembangunan (LEHKP).

Rencana tindak yang akan dilaksanakan yaitu melakukan pemetaan potensi hambatan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta.

3) IKK: Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi

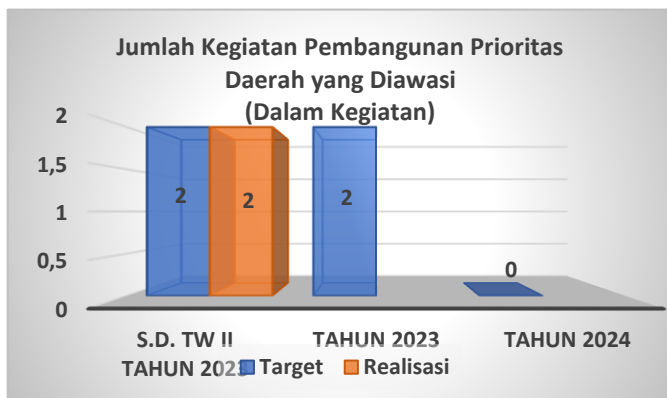
Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi sampai dengan triwulan II tahun 2023 sejumlah 2 (dua) kegiatan prioritas daerah.

Target IKK “Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi” pada tahun 2023 adalah 2 (dua) kegiatan prioritas daerah. Sampai dengan triwulan II tahun 2023 telah terealisasi 2 (dua) kegiatan prioritas daerah atau 100,00% dari tahun 2023.

IKK “Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi” diukur dengan jumlah topik pengawasan yang tertuang dalam Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD) pada tahun berjalan.



Capaian IKK ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian akhir periode Renstra



2020-2024, dikarenakan target ini baru muncul pada tahun 2022. Perbandingan target dan realisasi IKK “Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi” dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Faktor pendukung atas tercapainya target tersebut, yaitu terlaksananya pengawasan atas Agenda Pengawasan Prioritas Daerah (APPD) berupa Evaluasi atas Jogja *Smart Province* (JSP) dan Evaluasi Pengembangan Ekonomi Biru Wilayah Selatan D.I. Yogyakarta.

C. Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Kesadaran Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi Tanggung jawab Perwakilan BPKP.

1) IKK: Persentase Rekomendasi Strategis yang Ditindaklanjuti

Realisasi Persentase Rekomendasi Strategis yang Ditindaklanjuti s.d. triwulan II tahun 2023 sebesar 22,73%.

Target IKK “Persentase Rekomendasi Strategis yang Ditindaklanjuti” pada tahun 2023 adalah sebesar 80%. Sampai dengan triwulan II tahun 2023, telah ditindaklanjuti sebesar 22,73% atau tercapai sebesar 28,41% dari target 2023 sebesar 80,00%.

IKK “Persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti” diukur dengan jumlah rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi strategis pada laporan gubernur tahun sebelumnya.

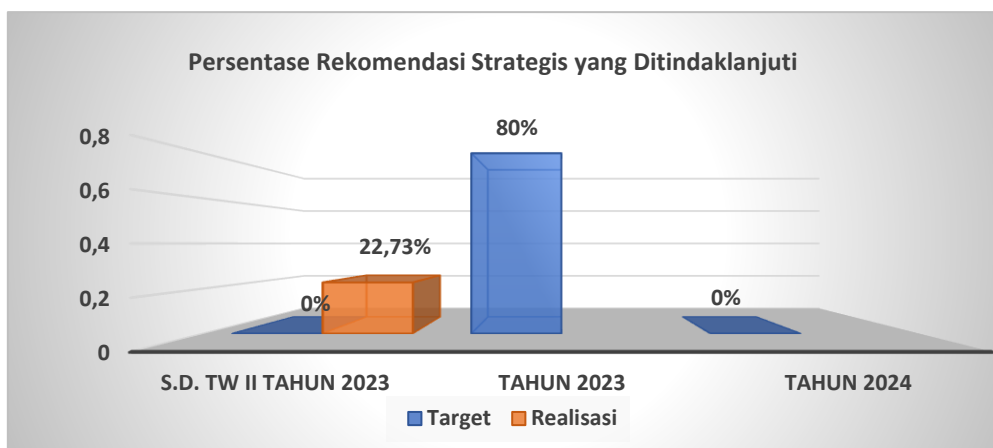
Rincian rekomendasi strategis yang telah ditindaklanjuti sebagai berikut:

No	Bidang	Jumlah Rekomendasi	Jumlah Tindak Lanjut	Capaian (%)
1	IPP	24	2	8,33
2	APD	23	1	4,35
4	AN	7	3	42,85
5	Investigasi	8	7	87,50
6	P3A	4	2	50,00
Jumlah		66	15	22,73



Capaian IKK ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian akhir periode Renstra 2020-2024, dikarenakan target ini baru muncul pada Tahun 2022.

Perbandingan target dan realisasi IKK “Persentase Rekomendasi Strategis yang Ditindaklanjuti” dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Upaya yang akan dilaksanakan untuk mencapai target IKK Persentase Rekomendasi Strategis yang Ditindaklanjuti adalah melaksanakan monitoring tindaklanjut rekomendasi strategis secara intensif dan periodik.

D. Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha

1) IKK: Jumlah BUMD dengan Pengelolaan Korporasinya Baik

Jumlah BUMD dengan Pengelolaan Korporasinya Baik sampai dengan triwulan II tahun 2023 sejumlah 2 (dua) BUMD.

Target IKK “Jumlah BUMD dengan Pengelolaan Korporasinya Baik” pada tahun 2023 sejumlah 1 (satu) BUMD. Sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebanyak 2 (dua) BUMD atau telah tercapai 200,00% (maksimal 120,00%) dari target tahun 2023 sebanyak 1 (satu) BUMD. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra 2020-2024 telah tercapai 100,00% dari target sejumlah 2 (dua) BUMD.

Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik yaitu:

- Perumda Air Minum Tirta Marta Kota Yogyakarta dengan skor 75,79 atau kategori baik yang merupakan hasil evaluasi GCG tahun 2022;
- Bank Pembangunan Daerah (BPD) D.I. Yogyakarta berdasarkan pengawasan tahun 2023 berupa Evaluasi Kualitas *Governance, Risk, Control, dan Compliance* (GRCC) serta Kinerja BPD D.I. Yogyakarta terhadap Kontribusi Pembangunan Daerah D.I. Yogyakarta dengan hasil tingkat kesehatan bank 2 (GCG dan MR dengan peringkat komposit 2, "sehat").



UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1:
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.
Silakan pindai kode QR dengan menggunakan aplikasi resmi dari BSrE untuk memastikan bahwa dokumen ini adalah asli.



IKK “Jumlah BUMD dengan Pengelolaan Korporasinya Baik” diukur dengan jumlah BUMD yang tata kelolanya baik dari hasil kegiatan *Assessment Good Corporate Governance*. Target dan realisasi Jumlah BUMD dengan Pengelolaan Korporasinya Baik bersifat kumulatif.

Perbandingan target dan realisasi “Jumlah BUMD dengan Pengelolaan Korporasinya Baik” dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Agenda Pengawasan Prioritas yang mendukung realisasi yaitu pengawasan BUMD (Fokus pada Bank Pembangunan Daerah) dengan penugasan Evaluasi Kualitas *Governance, Risk, Control, dan Compliance* (GRCC) serta Kinerja BPD DIY terhadap Kontribusi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Faktor pendukung atas tercapainya target tersebut yaitu dengan melaksanakan Bimbingan Teknis *Governance, Risk, Control, dan Compliance* (GRCC) termasuk di dalamnya sosialisasi dan monitoring Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) Badan Usaha Milik Daerah, MR, serta sosialisasi Kapabilitas SPI BUMD.

2) IKK: Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat

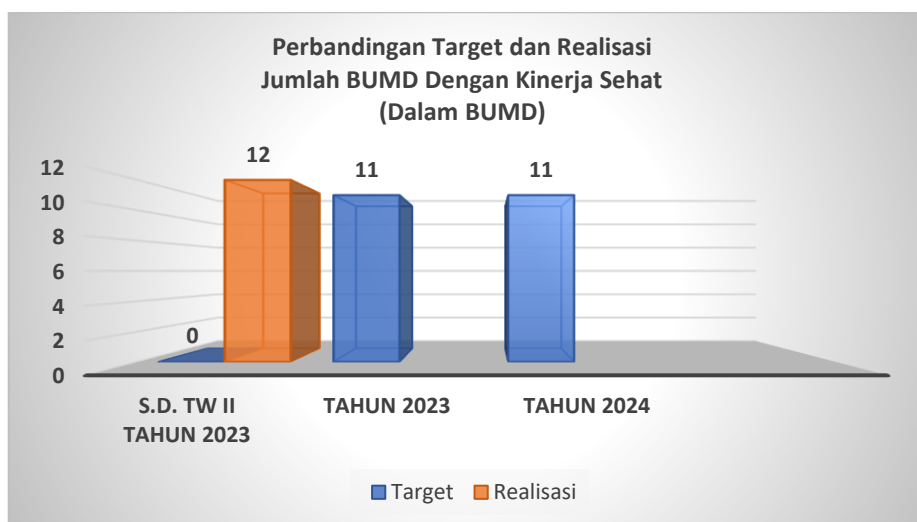
Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat s.d. triwulan II tahun 2023 sejumlah 12 BUMD.

Target IKK “Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat” pada tahun 2023 sebanyak 11 BUMD. Sampai dengan triwulan II tahun 2023 telah terealisasi sebanyak 12 BUMD atau telah tercapai 109,09% dari target tahun 2023 atau 109,09% dari target akhir periode Renstra 2020-2024 sejumlah 11 BUMD.

IKK “Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat” diukur dari jumlah BUMD dengan kinerja sehat dari hasil evaluasi kinerja yang dilakukan oleh BPKP ataupun assessor lainnya berdasarkan kriteria penilaian mencapai kategori “Sehat”.



Perbandingan target dan realisasi “Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat” dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Realisasi Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat sebanyak 12 BUMD dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama BUMD
1	Perumda Air Minum Tirta Binangun Kab Kulon Progo
2	Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kab Magelang
3	Perumda Air Minum Tirta Handayani Kab Gunung Kidul
4	Perumda Air Minum Tirta Sembada Kab Sleman
5	Perumda Air Minum Tirtamarta Kota Yogyakarta
6	Perumda Air Minum Tirta Projomansari Kab Bantul
7	Perumda Air Minum Tirta Perwitasari Kab Purworejo
8	Perumda Air Minum Kota Magelang
9	Perumda Air Minum Tirta Merapi Kab Klaten
10	Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa Kab Kebumen
11	Perumda Air Minum Tirta Wijaya Kab Cilacap
12	PT Aneka Usaha (Perseroda) Kab Klaten

Agenda Pengawasan Prioritas yang mendukung realisasi yaitu pengawasan atas:

- BUMD (Fokus pada Jasa Air) dengan penugasan evaluasi kinerja pada 11 perumda air minum di wilayah kerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta tahun buku 2022.



- BUMD (Fokus BUMD Aneka Usaha) dengan penugasan evaluasi kinerja PT Aneka Usaha Kabupaten Klaten dan PT Aneka Usaha Kabupaten Kulon Progo tahun buku 2022.

Faktor pendukung atas tercapainya target tersebut yaitu melalui pendampingan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMD, bimbingan teknis Penguatan Infrastruktur Manajemen Risiko BUMD, bimbingan teknis Rencana Strategis Bisnis/*Corporate Plan* BUMD, pendampingan penyusunan SOP Pengadaan Barang/Jasa, *Diagnostic Assesment* Implementasi Manajemen Risiko, pendampingan penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), sosialisasi dan monitoring Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) Badan Usaha Milik Daerah, serta sosialisasi Kapabilitas SPI BUMD.

Selain itu, untuk upaya strategis yang akan dilaksanakan untuk mencapai dan meningkatkan kinerja IKK “Jumlah BUMD dengan kinerja sehat” adalah dengan meningkatkan kualitas pengendalian intern dan tata kelola pada BUMD melalui kegiatan pemetaan, sosialisasi, *Diagnoctic Assessment*, *Assessment* MRI dan Kapabilitas SPI.

3) IKK: Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat

Realisasi Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat s.d. triwulan II tahun 2023 sebanyak 2 (dua) BLUD.

Target IKK “Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat” pada tahun 2023 sebanyak 2 (dua) BLUD. Sampai dengan triwan II telah terealisasi sebanyak 2 (dua) BLUD atau telah tercapai 100,00% dari target tahun 2023 atau mencapai 100,00% dari akhir periode Renstra 2020-2024 sejumlah dua BLUD.

IKK “Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat” diukur dari jumlah BLUD dengan kinerja sehat dari hasil evaluasi kinerja yang dilakukan oleh BPKP ataupun assessor lainnya berdasarkan kriteria penilaian mencapai kategori “Sehat”.



Perbandingan target dan realisasi “Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat” dapat dilihat pada grafik berikut:



• UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1:
 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.
 • Silakan pindai kode QR dengan menggunakan aplikasi resmi dari BSrE untuk memastikan bahwa dokumen ini adalah asli.



Agenda Pengawasan Prioritas yang mendukung realisasi yaitu pengawasan atas BLU/D (Fokus pada BLU/D Layanan Kesehatan - Rumah Sakit dan BLU/D Pengelolaan Dana) dengan rincian penugasan sebagai berikut:

- Evaluasi Kinerja dan Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sleman Tahun Buku 2022 dengan skor 83 (sangat baik);
- Evaluasi Kinerja dan Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Yogyakarta Tahun Buku 2022 dengan skor 80 (sangat baik).

Faktor pendukung atas tercapainya target tersebut yaitu dengan melaksanakan evaluasi kinerja pelayanan rumah sakit, evaluasi atas penerapan manajemen risiko pada RSUD, dan pendampingan penyusunan Laporan Keuangan BLUD, serta komitmen dari pimpinan BLUD dalam meningkatkan tata kelola BLUD.

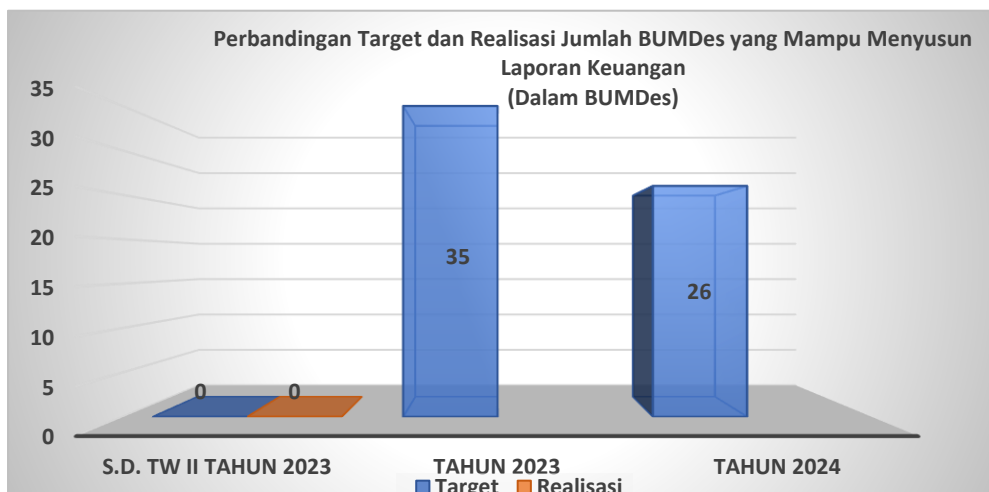
4) IKK : Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan

Belum ada realisasi Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan s.d. triwulan II tahun 2023.

Target IKK “Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan” pada tahun 2023 sebanyak 35 BUMDes. Sampai dengan triwulan II tahun 2023 belum ada realisasi capaian jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan.

IKK “Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan” diukur dengan Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan setelah adanya pendampingan oleh BPKP.

Perbandingan target dan realisasi "Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan Keuangan" dapat dilihat dalam grafik dibawah ini:



• UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1:
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
• Silakan pindai kode QR dengan menggunakan aplikasi resmi dari BSR.E untuk memastikan bahwa dokumen ini adalah asli.

5) IKK: Jumlah BUMDes yang Memberikan Kontribusi pada Perekonomian Desa

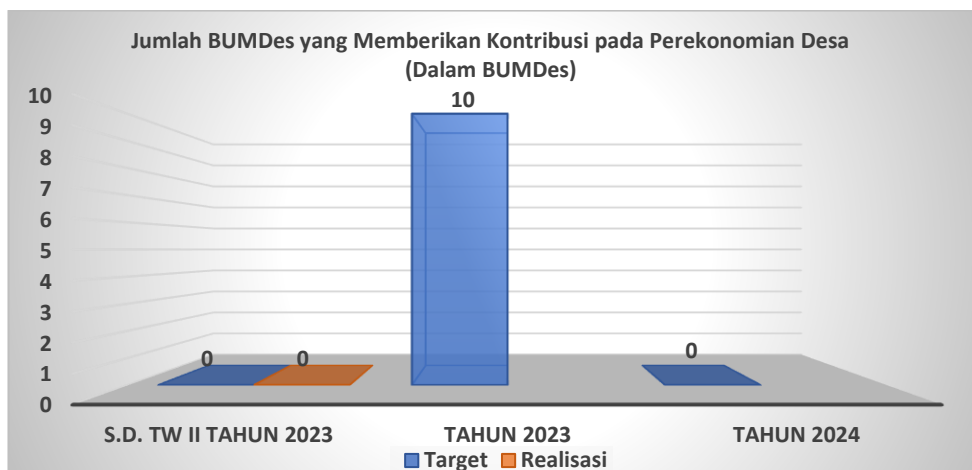
Belum ada realisasi Jumlah BUMDes yang Memberikan Kontribusi pada Perekonomian Desa s.d. triwulan II tahun 2023.

Target IKK “Jumlah BUMDes yang Memberikan Kontribusi pada Perekonomian Desa” pada tahun 2023 adalah 10 (sepuluh) BUMDes. Sampai dengan triwulan II tahun 2023 belum ada realisasi dikarenakan target kinerja dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2023.

IKK “BUMDes yang memberikan kontribusi pada Perekonomian Desa” diukur dengan menghitung jumlah BUMDes yang mampu memberikan kontribusi pada perekonomian desa pada tahun yang bersangkutan.

Realisasi IKK ini tidak dapat dibandingkan dengan akhir periode Renstra tahun 2020-2024, dikarenakan target ini baru muncul pada tahun 2022.

Perbandingan target dan realisasi “Jumlah BUMDes yang Memberikan Kontribusi pada Perekonomian Desa” dapat dilihat dalam grafik dibawah ini:



E. Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi

1) IKK: Persentase Hasil Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan/ Ditindaklanjuti

Realisasi Persentase Hasil Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan/ Ditindaklanjuti s.d. triwulan II tahun 2023 sebesar 50,00%.

Target IKK “Persentase Hasil Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti” pada tahun 2023 adalah 100%. Sampai dengan triwulan II tahun 2023 telah terealisasi sebanyak 50,00% atau telah tercapai 50,00% dari target tahun 2023 atau target akhir periode Renstra 2020-2023.



UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1:
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.
Silakan pindai kode QR dengan menggunakan aplikasi resmi dari BSrE untuk memastikan bahwa dokumen ini adalah asli.

Pengawasan BPKP di Bidang Investigasi yang bersifat represif dalam konteks untuk pengendalian korupsi meliputi pelaksanaan audit investigatif, audit penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN), dan pemberian keterangan ahli.

IKK “Persentase Hasil Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti” diukur dengan jumlah KLPBU/APH yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan represif tahun berjalan dibagi dengan jumlah pengawasan represif tahun sebelumnya.

Perbandingan target dan realisasi "Persentase Hasil Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti" dapat dilihat dalam grafik dibawah ini:



Agenda Prioritas Pengawasan yang mendukung capaian, yaitu pengawasan atas Pengendalian Kecurangan dan Hambatan Kelancaran Pembangunan dengan penugasan berupa audit PKKN dan pemberian keterangan ahli (PKA). Realisasi sebanyak 50,00% dihitung dari jumlah audit PKKN yang telah dimanfaatkan berupa pemberian keterangan ahli (PKA) dihadapan penyidik atas satu audit PKKN dari dua audit PKKN yang telah dilaksanakan. Rincian sebagai berikut:

- Audit PKKN dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun Anggaran 2020 serta Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 pada salah satu dinas Pendidikan telah tindak lanjut dengan pemberian keterangan ahli dihadapan penyidik;



- Audit PKKN Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dan Dana Desa TA 2018 dan 2019 pada salah satu kalurahan di Kabupaten Bantul belum dilakukan tindak lanjut berupa PKA dihadapan penyidik.

Upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target kinerja tahun 2023 yaitu meningkatkan koordinasi dengan APH agar hasil audit keinvestigasian Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta dapat segera ditindaklanjuti pada tahap litigasi berikutnya.

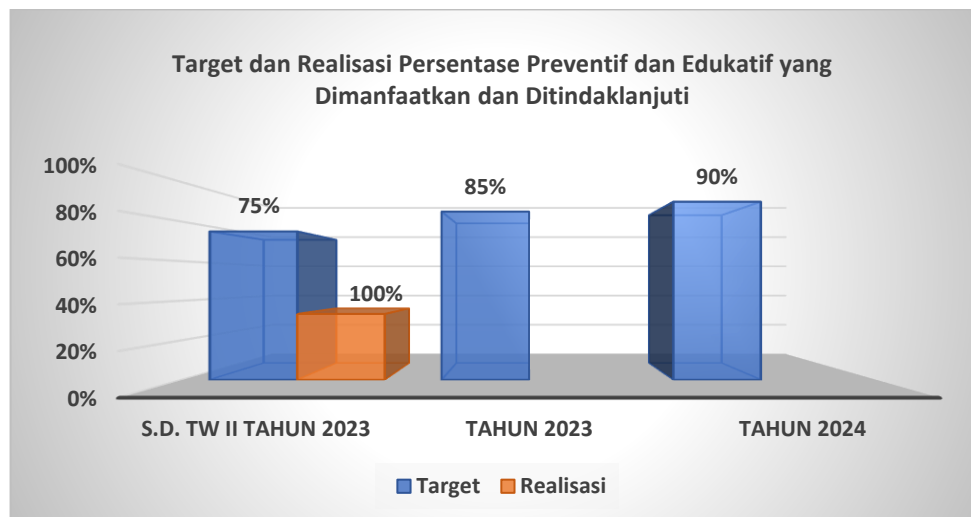
2) IKK: Persentase Hasil Pengawasan Preventif dan Edukatif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti

Realisasi Persentase Hasil Pengawasan Preventif dan Edukatif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti s.d. triwulan II tahun 2023 sebesar 100,00%.

Target IKK “Persentase Hasil Pengawasan Preventif dan Edukatif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti” pada tahun 2023 sebesar 85% dan s.d. triwulan II tahun 2023 sebesar 75%. Sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 100,00% atau telah tercapai 133,33% (maksimal 120,00%) dari target triwulan II atau 117,65% dari target tahun 2023. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra 2020-2024 telah tercapai sebesar 111,11% dari target sebesar 90.00%

Pencapaian IKK ini diukur dengan menghitung hasil pengawasan edukatif dan preventif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti dengan penugasan pengawasan preventif/edukatif yang telah dilaksanakan.

Perbandingan target dan realisasi “Persentase Hasil Pengawasan Preventif dan Edukatif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti” dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Agenda Pengawasan Prioritas yang mendukung realisasi yaitu pengawasan atas akuntabilitas atas pengelolaan anggaran pemilu berupa penugasan asistensi



penyusunan profil risiko kecurangan sehubungan dengan pelaksanaan pemilu. Sampai dengan triwulan II tahun 2023 telah dilakukan sebanyak 9 (sembilan) penugasan dan seluruhnya telah ditindaklanjuti dengan membuat register risiko kecurangan sebagai berikut:

- a. Penyusunan Profil Risiko Kecurangan (*Fraud Risk Assessment*) atas Akuntabilitas Pengadaan Logistik dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;
- b. Penyusunan Profil Risiko Kecurangan (*Fraud Risk Assessment*) atas Akuntabilitas Pengadaan Logistik dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Penyusunan Profil Risiko Kecurangan (*Fraud Risk Assessment*) atas Akuntabilitas Pengadaan Logistik dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;
- d. Penyusunan Profil Risiko Kecurangan (*Fraud Risk Assessment*) atas Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;
- e. Penyusunan Profil Risiko Kecurangan (*Fraud Risk Assessment*) atas Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;
- f. Penyusunan Profil Risiko Kecurangan (*Fraud Risk Assessment*) atas Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta;
- g. Penyusunan Profil Risiko Kecurangan (*Fraud Risk Assessment*) atas Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
- h. Penyusunan Profil Risiko Kecurangan (*Fraud Risk Assessment*) atas Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sleman;
- i. Penyusunan Profil Risiko Kecurangan (*Fraud Risk Assessment*) atas Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo.



Faktor pendukung pencapaian target tersebut antara lain:

- 1) Tanggapan mitra kerja yang responsif terhadap upaya pencegahan kecurangan;
- 2) Kesadaran akan arti pentingnya pengendalian kecurangan dalam pelaksanaan tupoksi mitra kerja;
- 3) Rencana tindak mendorong mitra kerja untuk melaksanakan dan melakukan monitoring atas rencana aksi profil risiko *fraud* yang telah disusun.

3) IKK: Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik

Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik triwulan II tahun 2023 sebanyak 4 (empat) pemda.

Target IKK “Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik” pada tahun 2023 sebanyak 3 (tiga) Pemda. Sampai dengan triwulan II tahun 2023 telah terealisasi sebanyak 4 (empat) pemda atau telah tercapai 133,33% (maksimal 120,00%) dari target tahun 2023 sebanyak 3 pemda. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra 2020-2024 telah tercapai 50,00% dari target sebanyak 8 (delapan) pemda.

Realisasi IKK tersebut berdasarkan hasil evaluasi yang telah divalidasi oleh pusat, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pemda
D.I Yogyakarta
Kabupaten Sleman
Kabupaten Magelang
Kabupaten Cilacap

IKK “Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik” diukur dengan menghitung skor indeks efektivitas pengendalian korupsi yang merupakan komposit skor atas tiga pilar, yaitu: kapabilitas pengelolaan risiko korupsi, penerapan strategi pencegahan, dan penanganan kejadian korupsi dengan minimal 3,00.

Perbandingan target dan realisasi “Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik” dapat dilihat pada grafik dibawah ini:





Agenda Pengawasan Prioritas yang mendukung realisasi yaitu Pengendalian Kecurangan dan Hambatan Kelancaran Pembangunan dengan penugasan berupa Monitoring Tindak Lanjut *Area of Improvement* (AoI) Hasil Evaluasi Penilaian IEPK Tahun 2022 pada 12 pemerintah daerah di wilayah kerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta.

Faktor pendukung paling utama atas tercapainya target tersebut adalah akseptabilitas K/L/P atas kegiatan pengukuran efektivitas pengendalian korupsi. Capaian kinerja tersebut didukung dengan pemanfaatan hasil pengawasan atas kegiatan Monitoring Tindak Lanjut *Area of Improvement* (AoI) Hasil Evaluasi Penilaian IEPK Tahun 2022 pada 12 pemerintah daerah di wilayah kerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta.

4) IKK: Jumlah Badan Usaha dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik

Belum ada realisasi Jumlah Badan Usaha dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik s.d. triwulan II tahun 2023.

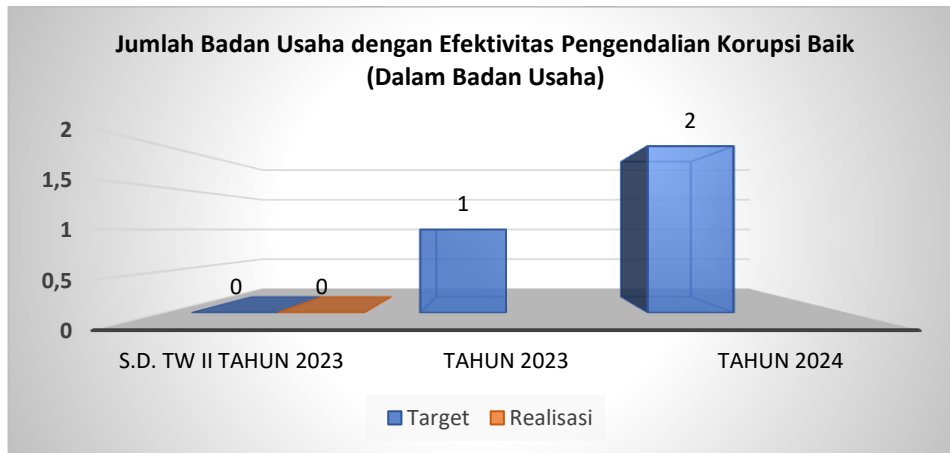
Target IKK “Jumlah Badan Usaha dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik” pada tahun 2023 sebanyak 1 (satu) Badan Usaha. Sampai dengan triwulan II tahun 2023 belum ada realisasi.

Pelaksanaan penilaian IEPK pada badan Usaha masih menunggu pedoman penilaian IEPK pada badan usaha dari rendal.

IKK “Jumlah Badan Usaha dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik” diukur dengan menghitung skor indeks efektivitas pengendalian korupsi yang merupakan komposit skor atas tiga pilar, yaitu: kapabilitas pengelolaan risiko korupsi, penerapan strategi pencegahan, dan penanganan kejadian korupsi dengan minimal 3,00.



Perbandingan target dan realisasi “Jumlah Badan Usaha dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik” dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



F. Sasaran Kegiatan 6: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU

1) IKK: Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3

Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 s.d. triwulan II tahun 2023 sebanyak 1 (satu) APIP.

Target IKK “Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3” pada tahun 2023 sebanyak 1 (satu). Sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebanyak 1 (satu) APIP atau telah tercapai 100% dari target tahun 2023 maupun dari target akhir periode Renstra 2020-2024. Realisasi tersebut berdasarkan evaluasi Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah D.I. Yogyakarta tahun 2022 sesuai Laporan Nomor PE.09.03/LHP-418/PW12/6/2022 tanggal 30 November 2022 yang telah mencapai level 3 dengan skor sebesar 3,25.

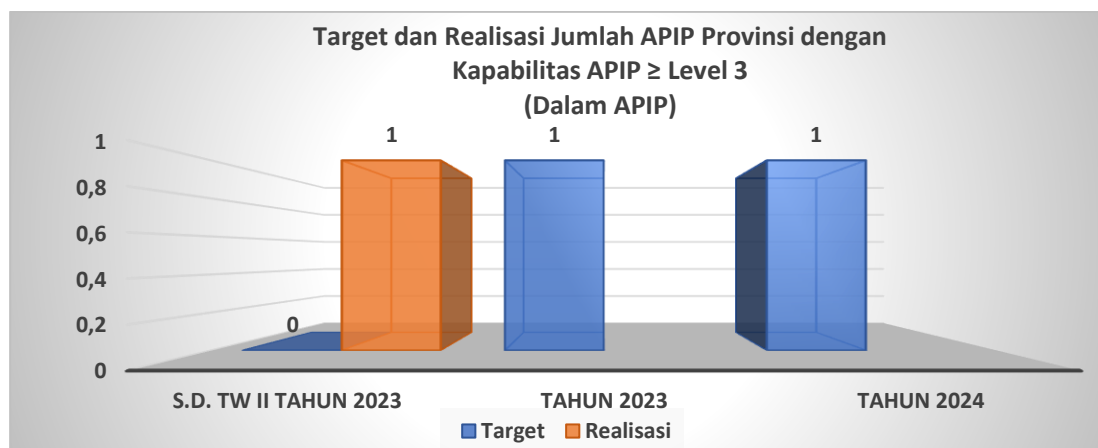
IKK “Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3” diukur dengan menghitung jumlah Inspektorat Provinsi yang Kapabilitas APIP-nya mencapai level \geq 3.

Target dan realisasi IKK “Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3” bersifat kumulatif.

Perbandingan target dan realisasi “Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3” dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



• UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1:
 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.
 • Silakan pindai kode QR dengan menggunakan aplikasi resmi dari BSrE untuk memastikan bahwa dokumen ini adalah asli.



Agenda Pengawasan Prioritas yang mendukung realisasi yaitu Kapabilitas APIP Pemerintah Daerah. Untuk penilaian tahun 2023, sampai dengan triwulan II tahun 2023 Inspektorat Daerah D.I. Yogyakarta masih dalam proses penilaian mandiri Kapabilitas APIP.

Rencana tindak untuk mempertahankan capaian yaitu dengan meningkatkan layanan pendampingan dan konsultasi terhadap APIP. Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta sampai dengan triwulan II 2023 telah melakukan bimbingan teknis audit investigatif pada Inspektorat Daerah D.I. Yogyakarta.

2) IKK: Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3

Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 s.d. triwulan II tahun 2023 sebanyak 11 (sebelas) APIP.

Target IKK “Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3” pada tahun 2023 sebanyak 11 (sebelas). Sampai dengan triwulan II tahun 2023 telah mencapai 100% dari target tahun 2023 maupun akhir periode Renstra 2020-2024 sebanyak 11 (sebelas) APIP. Realisasi tersebut berdasarkan penilaian dengan

pedoman Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penilaian Kapabilitas APIP.

Penilaian Kapabilitas APIP telah dilakukan evaluasi kembali pada tahun 2022 dengan menggunakan pedoman yang baru yaitu Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 19 November 2021 tentang Penilaian Kapabilitas APIP pada K/L/D.

IKK “Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3” diukur berdasarkan hasil penetapan level Kapabilitas APIP dari hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh BPKP. Target dan realisasi IKK “Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3” bersifat kumulatif.

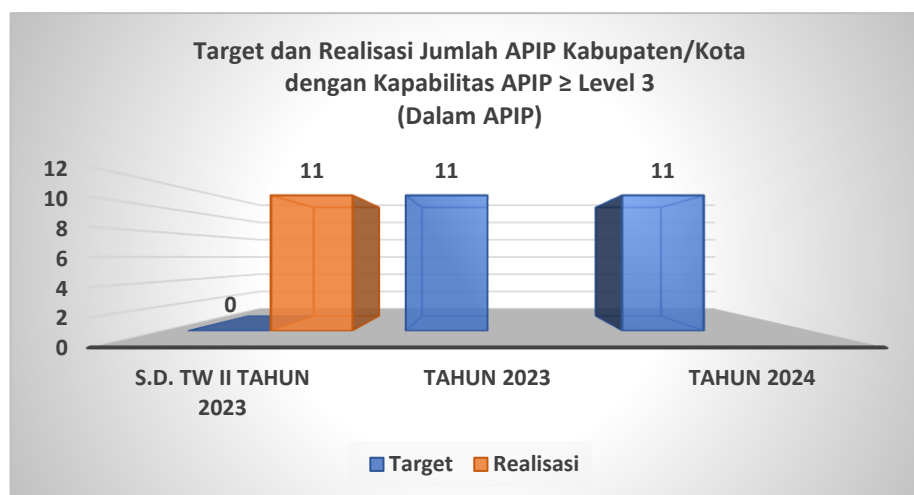


Capaian IKK jumlah APIP kabupaten/kota yang sudah mencapai Kapabilitas APIP level 3 sebagai berikut:

No	Nama APIP	Level
1	Inspektorat Kabupaten Sleman	L3
2	Inspektorat Kabupaten Purworejo	L3
3	Inspektorat Kabupaten Kulon Progo	L3
4	Inspektorat Kabupaten Cilacap	L3
5	Inspektorat Kabupaten Magelang	L3
6	Inspektorat Kabupaten Gunungkidul	L3
7	Inspektorat Kota Yogyakarta	L3
8	Inspektorat Kabupaten Bantul	L3
9	Inspektorat Kota Magelang	L3
10	Inspektorat Kabupaten Klaten	L3
11	Inspektorat Kabupaten Kebumen	L3

*) Realisasi hasil evaluasi tahun 2022

Perbandingan target dan realisasi “Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3” dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Agenda Pengawasan Prioritas yang mendukung realisasi yaitu penugasan evaluasi atas Kapabilitas APIP Pemerintah Daerah. Untuk penilaian tahun 2023, sampai dengan triwulan II tahun 2023 seluruh APIP kabupaten/kota di wilayah kerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta masih dalam proses penilaian mandiri Kapabilitas APIP.

Rencana tindak untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian yaitu dengan meningkatkan pendampingan dan konsultasi terhadap APIP. Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta sampai dengan triwulan II tahun 2023 telah melakukan bimbingan



teknis/pelatihan kantor sendiri pada Inspektorat kabupaten/kota di wilayah kerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta dengan materi sebagai berikut:

- Audit Kinerja Berbasis Risiko;
- Penyusunan Risiko Strategis Pemda dan Perangkat Daerah;
- Probity Audit;
- Manajemen Risiko dan *Fraud Risk Assesment*;
- Audit Investigatif;
- Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pemda;
- Evaluasi Rencana Kerja (Renja), dan Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
- Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP.

3) IKK: IKK: Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3

Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 s.d. triwulan II tahun 2023 sejumlah 1 (satu) provinsi.

Target IKK “Jumlah APIP Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3” pada tahun 2023 sejumlah 1 (satu) provinsi. Sampai dengan triwulan II tahun 2023 telah mencapai 1 (satu) provinsi atau 100,00% dari target tahun 2023 maupun target akhir periode Renstra 2020-2024 sejumlah 1 (satu) provinsi. Realisasi tersebut berdasarkan hasil evaluasi tahun 2022 dengan metode penilaian cepat dimana nilai skor Maturitas SPIP pada Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta sebesar 3,535.

IKK “Jumlah Provinsi dengan dengan Maturitas SPIP \geq Level 3” diukur berdasarkan hasil penetapan level Maturitas SPIP dari hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh BPKP.

Target dan realisasi IKK “Jumlah Provinsi dengan dengan Maturitas SPIP \geq Level 3” bersifat kumulatif.

Perbandingan target dan realisasi IKK “Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3” dapat dilihat pada grafik berikut:





Agenda Pengawasan Prioritas yang mendukung realisasi yaitu Maturitas SPIP/MRI Pemerintah Daerah. Pada tahun 2023 telah dilakukan penugasan bimbingan dan konsultasi pelaksanaan penilaian mandiri dan aplikasi penilaian SPIP pada Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta.

Faktor-faktor pendukung capaian target sebesar 100,00% adalah komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah D.I Yogyakarta dalam menyelenggarakan pengendalian intern yang ditunjukkan dari kualitas perencanaan dan penerapan *whistleblowing*, sehingga standar pelayanan publik pada Reformasi Birokrasi menunjukkan Zona Hijau. Hal ini didukung oleh upaya yang telah dilakukan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta untuk mencapai target tersebut, diantaranya dengan melaksanakan pemantauan atas penerapan pengendalian intern Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta dan memberikan bimbingan teknis terhadap penerapan SPIP Terintegrasi.

4) IKK: Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3

Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebanyak 10 (sepuluh) kabupaten/kota.

Target IKK “Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3” pada tahun 2023 sebanyak 11 (sebelas) kabupaten/kota. Realisasi jumlah kabupaten/kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebanyak 10 (sepuluh) kabupaten/kota atau mencapai 90,91% dari target tahun 2023 maupun target akhir periode Renstra 2020-2024 sebanyak 11 (sebelas) kabupaten/kota.

Hasil penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP berdasarkan Peraturan Badan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 pada 11 (sebelas) kabupaten/kota di wilayah kerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta sebagai berikut:

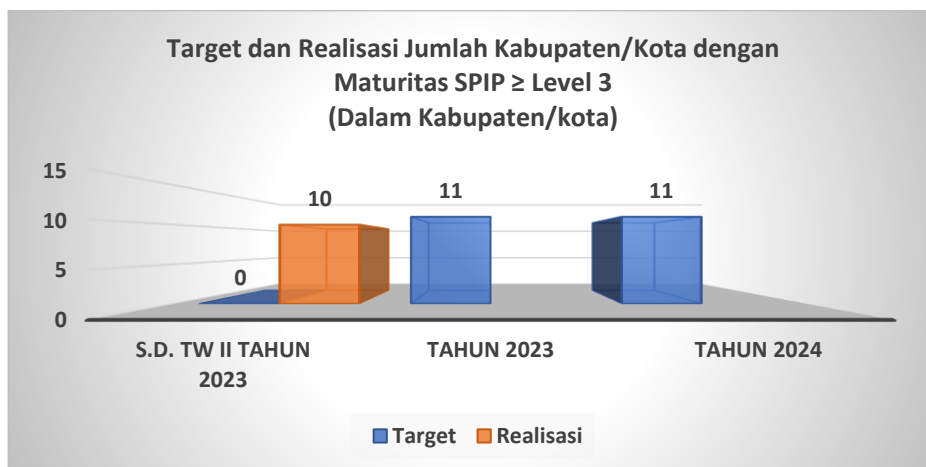


No	Nama Pemda	Level
1	Inspektorat Kabupaten Sleman	L3
2	Inspektorat Kabupaten Purworejo	L3
3	Inspektorat Kabupaten Kulon Progo	L3
4	Inspektorat Kabupaten Cilacap	L3
5	Inspektorat Kabupaten Magelang	L3
6	Inspektorat Kabupaten Gunungkidul	L3
7	Inspektorat Kabupaten Bantul	L3
8	Inspektorat Kota Magelang	L3
9	Inspektorat Kabupaten Klaten	L3
10	Inspektorat Kabupaten Kebumen	L3
11	Kota Yogyakarta	L2

*) realisasi hasil evaluasi tahun 2022 sesuai hasil Evaluasi atas Pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada 10 Pemda Kabupaten/Kota dan Evaluasi dengan metode Penilaian Cepat pada 1 Pemda, yaitu Kabupaten Klaten

IKK “Jumlah Kabupaten/Kota dengan dengan Maturitas SPIP \geq Level 3” diukur berdasarkan hasil penetapan level Maturitas SPIP dari hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh BPKP. Target dan realisasi IKK “Jumlah Kabupaten/Kota dengan dengan Maturitas SPIP \geq Level 3” bersifat kumulatif.

Perbandingan target dan realisasi IKK “Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3” dapat dilihat pada grafik berikut:



Tidak tercapainya target jumlah kabupaten/kota dengan maturitas SPIP \geq Level 3, disebabkan adanya kasus OTT KPK terhadap Eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti sebagai tersangka suap terkait pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Apartemen di Yogyakarta.



Sedangkan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP tahun 2023 belum dilaksanakan karena kabupaten/kota masih dalam proses penilaian mandiri. Agenda Pengawasan Prioritas yang mendukung realisasi yaitu Maturitas SPIP/MRI Pemerintah Daerah, dimana penugasan yang telah dilakukan sampai dengan triwulan II tahun 2023 yaitu bimbingan teknis peningkatan kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi/Manajemen Risiko pada 7 (tujuh) kabupaten/kota di wilayah kerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta, dan monitoring pelaksanaan renaksi *Area of Improvement* hasil evaluasi SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Rencana tindak yang akan dilakukan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian "Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3" adalah melakukan pemantauan penerapan rencana aksi atas *Area of Improvement (AoI)* hasil evaluasi penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi sesuai target waktu yang telah disepakati.

5) IKK: IKK: Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level

Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3 sampai dengan triwulan I tahun 2023 sebanyak 1(satu)

Target IKK "Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3" pada tahun 2023 sejumlah 1 (satu) provinsi. Realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebanyak 1 (satu) provinsi atau telah tercapai 100% dari target tahun 2023 maupun akhir periode

Renstra 2020-2024. Realisasi tersebut berdasarkan hasil evaluasi tahun 2022 dengan metode penilaian cepat menghasilkan nilai skor MRI pada Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta sebesar 3,260.

Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3 diukur dengan jumlah provinsi yang memperoleh capaian MRI \geq Level 3

Perbandingan target dan realisasi IKK "Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3"



dapat dilihat pada grafik berikut:

Agenda Pengawasan Prioritas yang mendukung realisasi yaitu Maturitas SPIP/MRI Pemerintah Daerah.



Faktor pendukung atas tercapainya target yaitu komitmen dari Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta dalam menerapkan pengelolaan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta, hal tersebut didukung dengan upaya peningkatan kompetensi pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta dalam pelatihan Pengawasan Intern tahun 2022 yang diselenggarakan di Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta, salah satu materi yang disampaikan terkait “Tata Kelola Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern”.

6) IKK IKK: : Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3

Jumlah Pemda Kabupaten/ Kota dengan MRI \geq Level 3 s.d. triwulan II tahun 2023 sebanyak 3 (tiga) kabupaten/kota.

Target IKK “Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3” pada tahun 2023 sebanyak 5 (lima) kabupaten/kota. Realisasi s.d. triwulan II tahun 2023 sebanyak 3 (tiga) kabupaten/Kota atau mencapai 60,00 % dari target tahun 2023 sebanyak 5 (lima) kabupaten/kota. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra 2020-2024 telah tercapai 37,50% dari target sebesar 8 (delapan) kabupaten/kota.

Realisasi jumlah kabupaten/kota dengan MRI \geq Level 3 hasil evaluasi atas PM Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi tahun 2022 sebagai berikut:

No	Nama Pemda	Level
1	Inspektorat Kabupaten Sleman	L3
2	Inspektorat Kabupaten Purworejo	L3
3	Inspektorat Kabupaten Kulon Progo	L3
4	Inspektorat Kabupaten Cilacap	L3
5	Inspektorat Kabupaten Magelang	L3
6	Inspektorat Kabupaten Gunungkidul	L3
7	Inspektorat Kabupaten Bantul	L3
8	Inspektorat Kota Magelang	L3
9	Inspektorat Kabupaten Klaten	L3
10	Inspektorat Kabupaten Kebumen	L3
11	Kota Yogyakarta	L2

- *) realisasi hasil evaluasi tahun 2022 sesuai hasil Evaluasi atas Pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada 10 Pemda Kabupaten/Kota dan Evaluasi dengan metode Penilaian Cepat pada 1 Pemda, yaitu Kabupaten Klaten.



Perkembangan IKK “Jumlah Pemda Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3” dapat dilihat pada grafik berikut:



Evaluasi penerapan manajemen risiko pada 11 (sebelas) kabupaten/kota di wilayah kerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta belum dilaksanakan karena masih dalam proses penilaian mandiri.

Agenda Pengawasan Prioritas yang mendukung realisasi yaitu Maturitas SPIP/MRI Pemerintah Daerah. Penugasan yang telah dilakukan sampai dengan triwulan II tahun 2023 yaitu bimbingan teknis Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi/Manajemen Risiko pada 7 (tujuh) kabupaten/kota di wilayah kerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta.

Rencana tindak yang akan dilakukan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian jumlah kabupaten/kota dengan MRI \geq Level 3 adalah melakukan pemantauan berkala bagi pemerintah daerah kabupaten/kota yang telah mencapai MRI \geq Level 3, serta memberikan bimbingan teknis bagi pemerintah daerah kabupaten/kota yang belum mencapai MRI \geq Level 3.

Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta memberikan ruang diskusi dan masukan atas kendala penerapan Manajemen Risiko agar rencana tindak pengendalian yang dirumuskan efektif untuk menurunkan level risiko.

7) IKK: Jumlah Pemda yang Akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah

Jumlah Pemda yang Akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebanyak 8 (delapan) pemda.

Target IKK “Jumlah Pemda yang Akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah” pada tahun 2023 sebanyak 9 (sembilan) pemda dan target s.d. triwulan II tahun 2023 sebesar 4 (empat) pemda.



Sampai dengan triwulan II tahun 2023 telah terealisasi sebesar 8 (delapan) pemda atau 200,00% (maksimal 120%) dari target s.d. triwulan II tahun 2003 sebanyak 4 (empat) pemda, dan telah tercapai 88,88% dari target tahun 2023 maupun target akhir tahun Renstra 2020-2024 sebanyak 9 (sembilan) pemda. Pemda yang akuntabel (efisien dan efektif) dalam pengelolaan keuangan dan kinerja tercermin dari Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan nilai evaluasi SAKIP minimal BB.

IKK "Jumlah Pemda yang Akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah" diukur dengan menghitung jumlah Pemda yang memperoleh Opini LKPD WTP dan nilai evaluasi SAKIP minimal BB.

Capaian Opini LKPD Tahun 2022 dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Pemerintah Daerah	Capaian Opini LKPD
Provinsi D.I Yogyakarta	WTP
Kabupaten Bantul	WTP
Kabupaten Sleman	WTP
Kabupaten Kulon Progo	WTP
Kabupaten Gunung Kidul	WTP
Kabupaten Klaten	WTP
Kabupaten Magelang	WTP
Kabupaten Kebumen	WTP
Kabupaten Purworejo	WTP
Kabupaten Cilacap	WTP
Kota Yogyakarta	WTP
Kota Magelang	WTP

Perbandingan target dan realisasi IKK "Jumlah Pemda yang Akuntabel dalam



Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah" dapat dilihat pada grafik berikut:

Agenda Pengawasan Prioritas yang mendukung realisasi adalah Jumlah Pemda



yang Akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah. Penugasan yang telah dilaksanakan berupa bimbingan teknis Implementasi FMIS pada Pemda dan Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Daerah (SAKIP) sebagai berikut:

- Pendampingan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen;
- Narasumber bimbingan teknis FMIS terkait Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen;
- Pendampingan Analisa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022;
- Bimbingan teknis Rencana Aksi Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten Klaten.

Rencana tindak untuk mempertahankan/meningkatkan capaian kinerja yaitu:

- Melakukan optimalisasi bimbingan teknis Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah di wilayah kerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta;
- Melakukan optimalisasi bimbingan teknis Penyusunan Laporan Keuangan Daerah (LKPD).

8) IKK : Jumlah Desa yang Pengelolaannya Akuntabel

Jumlah Desa yang Pengelolaannya Akuntabel sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebanyak 40 desa.

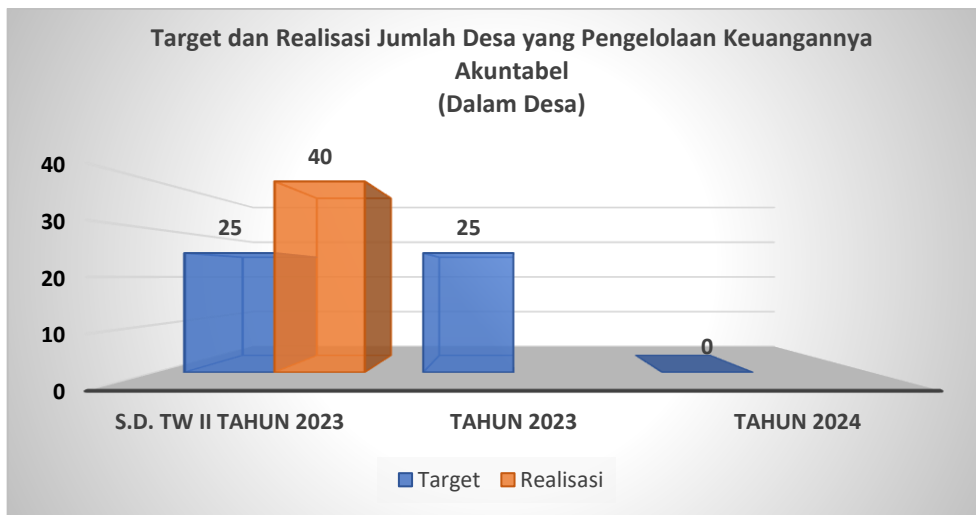
Target IKK “Jumlah Desa yang Pengelolaannya Akuntabel” tahun 2023 sebanyak 25 desa. Sampai dengan triwulan II tahun 2023 telah terealisasi sebesar 40 desa atau 160,00% (maksimal 120%) dari target s.d. triwulan II tahun 2023 atau target tahun 2023 sebanyak 25 desa.

IKK “Jumlah Desa yang Pengelolaannya Akuntabel” diukur dengan menghitung Jumlah Desa yang Pengelolaannya Akuntabel.

IKK ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian target akhir periode Renstra Tahun 2020-2024, karena IKK ini baru muncul di tahun 2022.

Perbandingan target dan realisasi IKK “Jumlah Desa yang Pengelolaannya Akuntabel” dapat dilihat pada grafik dibawah ini:





Agenda Pengawasan Prioritas yang mendukung realisasi "Jumlah Desa yang Pengelolaannya Akuntabel" yaitu Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Desa dan Pengawasan Aset Desa dengan rincian sebagai berikut:

- Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Keuangan Desa Tahun 2019 sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Evaluasi Akuntabilitas Aset Desa Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
- Evaluasi Akuntabilitas Aset Desa Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Klaten.

Faktor-faktor pendukung capaian target antara lain pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa responsif terhadap upaya peningkatan pengelolaan keuangan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

9) IKK: Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa Secara Memadai

Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa Secara Memadai s.d. triwulan II tahun 2023 sebanyak 321 desa.

Target IKK "Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa Secara Memadai" tahun 2023 sebanyak 25 desa. Sampai dengan triwulan II tahun 2023 telah terealisasi sebanyak 321 desa atau 1.284,00% (maksimal 120,00%) dari target tahun 2023 sebanyak 25 desa.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra 2020-2024, secara akumulasi IKK tersebut telah mencapai sebanyak 321 desa atau 62,82% dari target sebesar 511 desa.



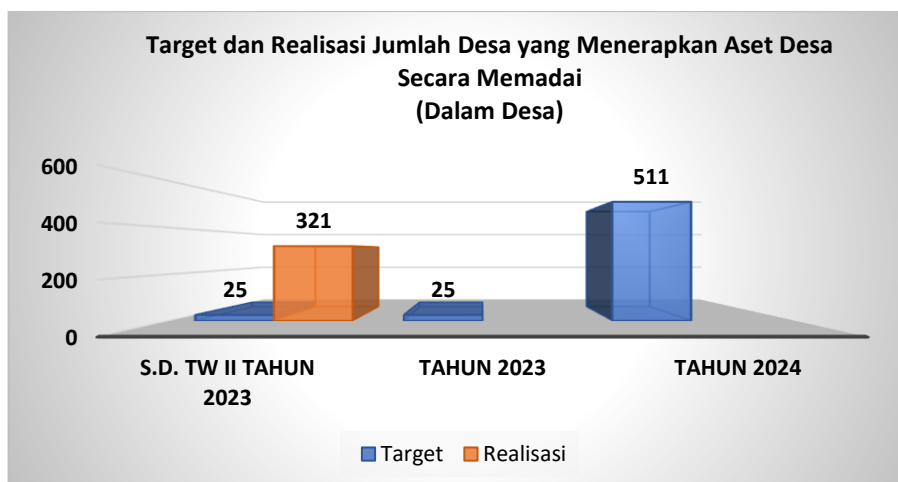
Berdasarkan hasil pengawasan secara akumulasi realisasi desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai sebagai berikut:

No	Kabupaten	Jumlah Desa
Pengawasan Tahun 2021		
1	Kabupaten Kulon Progo	8 Desa
2	Kabupaten Sleman	11 Desa
	Jumlah s.d. Tahun 2021	19 Desa
Pengawasan Tahun 2022		
1	Kabupaten Gunungkidul	120 Desa
2	Kabupaten Kebumen	107 Desa
	Jumlah s.d. Tahun 2022	246 Desa
Pengawasan Tahun 2023		
1	Kabupaten Klaten	10 Desa
2	Kabupaten Cilacap	65 Desa
	Jumlah sd Tahun 2023	321 Desa

IKK “Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa Secara Memadai” diukur dengan menghitung jumlah desa yang telah menerapkan pengelolaan aset desa sesuai ketentuan berdasarkan pengujian atas pengendalian intern tata kelola aset desa.

Target dan realisasi Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa Secara Memadai bersifat kumulatif.

Perbandingan target dan realisasi IKK “Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa Secara Memadai ” dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Pengawasan yang dilakukan pada tahun 2023 yang mendukung APP Tata Kelola dan Akuntabilitas Aset Desa berupa Evaluasi Tata Kelola dan Akuntabilitas Aset Desa, monitoring Tata Kelola dan Akuntabilitas Aset Desa dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Desa. Hal ini meningkatkan jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa pada Tahun 2023 sebanyak 75 desa.

Strategi yang akan dilakukan oleh Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta selanjutnya untuk meningkatkan jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai melalui bimbingan teknis tata kelola aset desa dan memonitor pelaksanaan pengelolaan aset di desa.

10) IKK: Jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3

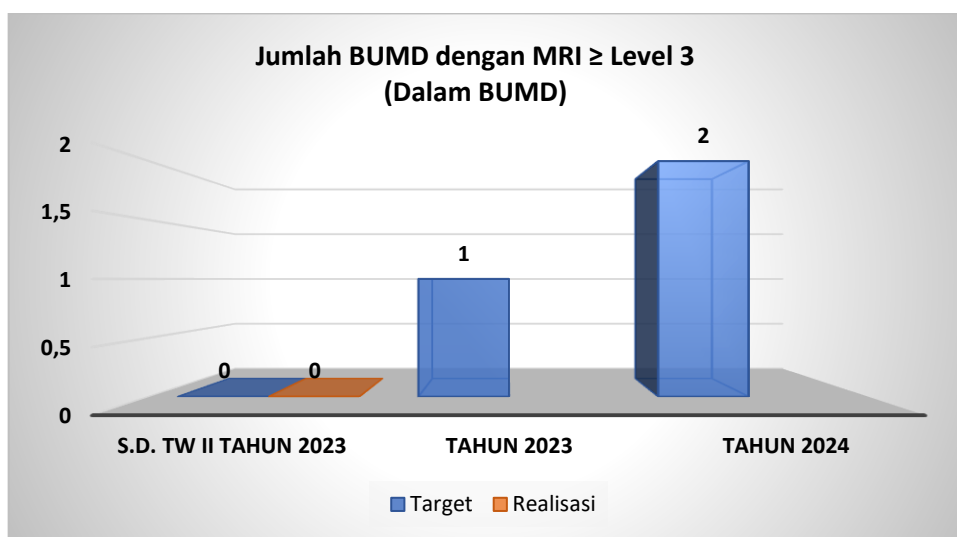
Belum ada realisasi jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3 s.d. triwulan II tahun 2023.

Target IKK “Jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3” tahun 2023 sejumlah 1 (satu) BUMD. Sampai dengan triwulan II tahun 2023 belum ada realisasi, karena rencana aksi kinerja ditargetkan di triwulan IV tahun 2023.

IKK “Jumlah BUMD dengan MRI \geq level 3” diukur dengan jumlah BUMD yang mengimplementasikan pengelolaan/manajemen risiko dan berada pada maturitas MRI \geq level 3.

Target dan realisasi jumlah BUMD dengan MRI \geq level 3 bersifat kumulatif.

Perbandingan target dan realisasi IKK “Jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3” dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Agenda Pengawasan Prioritas untuk mendukung capaian “Jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3” yaitu pengawasan atas Manajemen Risiko Badan Usaha



melalui penugasan berupa bimbingan teknis Manajemen Risiko Badan Usaha Milik Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Tirtamarta Kota Yogyakarta.

11) IKK: Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3

Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3 s.d. triwulan II tahun 2023 sebanyak 4 (empat) BLUD.

Target IKK “Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3” tahun 2023 sebanyak 5 (lima) BLUD. Sampai dengan triwulan II tahun 2023 telah terealisasi sebanyak 4 (empat) BLUD atau 80,00% dari target tahun 2003. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra 2020-2024 sebanyak 7 (tujuh) BLUD, IKK tersebut telah mencapai 57,17%.

Adapun BLUD dengan MRI \geq Level 3 berdasarkan pemetaan tahun 2022 tersebut yaitu:

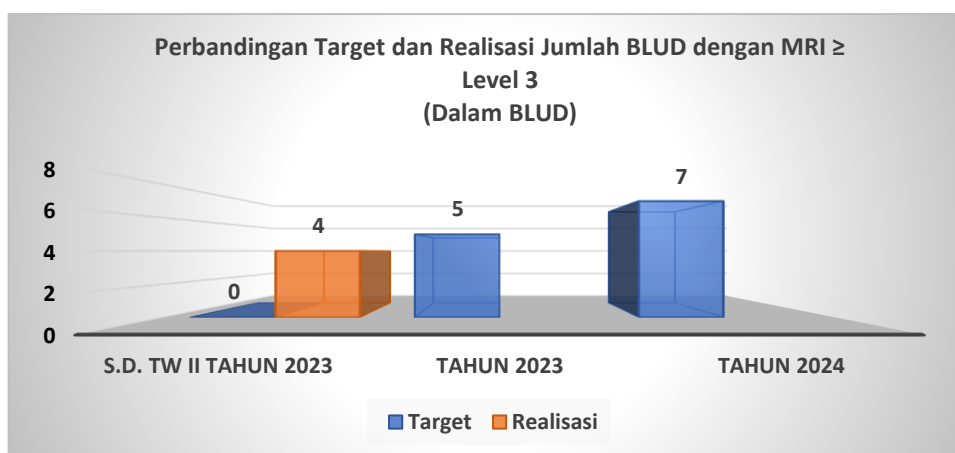
- RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo
- RSUD Prambanan Kabupaten Sleman
- RSUD Kota Yogyakarta
- Rumah Sakit Jiwa Grhasia Daerah Istimewa Yogyakarta

Untuk tahun 2023 belum dilakukan penilaian kembali.

IKK “Jumlah BLUD dengan MRI \geq level 3” diukur dengan jumlah BLUD yang mengimplementasikan pengelolaan/manajemen risiko dan berada pada maturitas MRI \geq level 3.

Target dan realisasi jumlah BLUD dengan MRI \geq level 3 bersifat kumulatif.

Perbandingan target dan realisasi IKK “Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3” dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Agenda Pengawasan Prioritas untuk mendukung capaian jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3 yaitu pengawasan atas Manajemen Risiko Badan Usaha.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target tahun 2023 yaitu dengan melakukan bimbingan teknis penerapan manajemen risiko pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai berikut:

- RSUD dr. Tjitrowardojo Purworejo;
- Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cilacap;
- Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Kabupaten Gunungkidul;
- Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sleman.

12) IKK: Jumlah BUMD dengan kapabilitas SPI \geq Level 3

Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3 sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebanyak 1 (satu) BUMD.

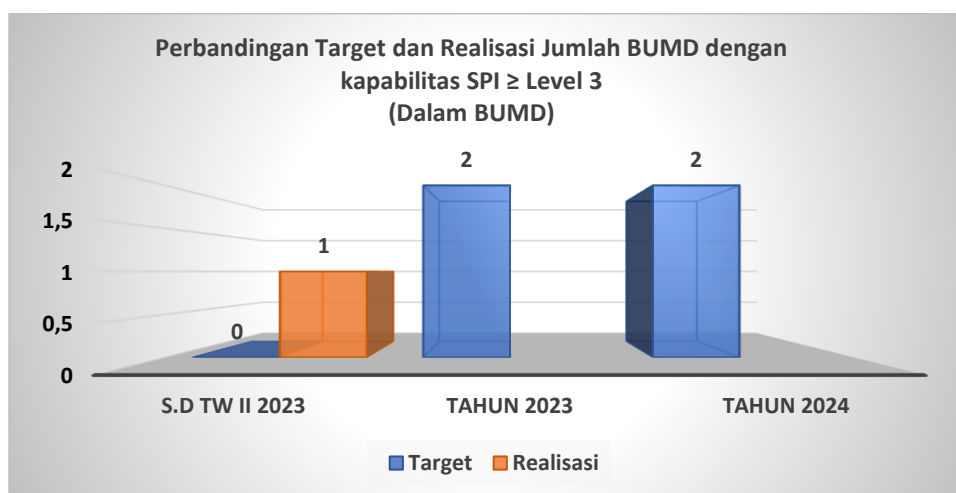
Target IKK “Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3” pada tahun 2023 sebanyak 2 (dua). Realisasi s.d. triwulan II tahun 2023 sebanyak 1 (satu) BUMD atau mencapai 50,00.% dari target tahun 2023. Realisasi tersebut berdasarkan hasil pemetaan tahun 2022 pada

Perumda Air Minum Tirta Binangun Kulon Progo

IKK “Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3” diukur dengan jumlah BUMD yang melaksanakan peran SPI dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3.

Target dan realisasi jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3

Perbandingan target dan realisasi IKK “Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3” dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Agenda Pengawasan Prioritas yang mendukung realisasi BUMD dengan kapabilitas SPI \geq Level 3 yaitu BUMD (Fokus pada BU Jasa Air).



Upaya yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan II tahun 2023 untuk mencapai target tahun 2023 dengan melakukan bimbingan teknis Penilaian Mandiri Kapabilitas SPI BUMD pada:

- Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sembada Kabupaten Sleman;
- Bimbingan Teknis Kapabilitas SPI Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo.

13) IKK: Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3

Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3 s.d. triwulan II tahun 2023 sebanyak 2 (dua) BLUD.

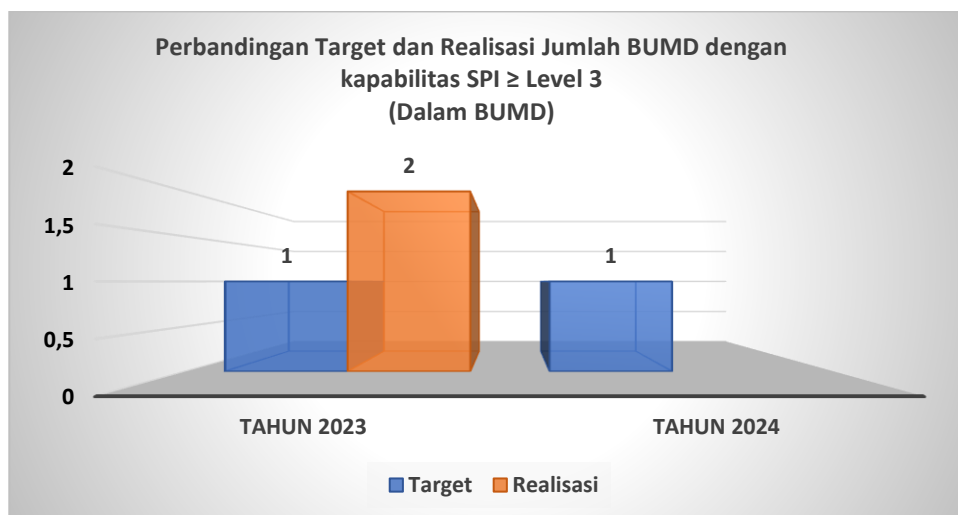
Target IKK “Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3” pada tahun 2023 sebanyak 1 (satu) BLU/D. Realisasi s.d. triwulan II tahun 2023 sebanyak 2 (dua) BLU/D atau mencapai 200% (maksimal 120%) dari target tahun 2023.

Realisasi BLU/D dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3 tersebut berdasarkan pemetaan tahun 2022 pada RSUD Wates dan RSUD Prambanan Tahun 2023 belum dilakukan penilaian.

IKK “Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3” diukur dengan jumlah BLU/D yang melaksanakan peran SPI dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3.

Target dan realisasi jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3 bersifat kumulatif.

Perbandingan target dan realisasi IKK “Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3” dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Agenda Pengawasan Prioritas yang mendukung realisasi yaitu BLU/D (Fokus pada BLU/D Layanan Kesehatan-Rumah Sakit dan BLU/D Pengelolaan Dana).

Upaya yang telah dilakukan sampai dengan triwulan II tahun 2023 yaitu melakukan bimbingan teknis Penilaian Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern (SPI) Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedirman Kabupaten Kebumen.

G. Sasaran Kegiatan 7: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Unit Kerja

1) IKK: Nilai Zona Integritas Unit Kerja

Realisasi Nilai Zona Integritas Unit Kerja s.d. triwulan II tahun 2023 sebesar 88,01.

Target IKK “Nilai Zona Integritas Unit Kerja” pada tahun 2023 sebesar 75. Realisasi nilai zona integritas s.d. triwulan II tahun 2023 sebesar 88,01 atau mencapai 117,34 dari target tahun 2023 sebesar 75. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra 2020-2024 telah tercapai sebesar 97,78% dari target skor sebesar 90,00.

Realiasi tersebut merupakan hasil dari evaluasi Inspektorat BPKP atas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta tahun 2023.

IKK “Nilai Skor Zona Integritas” diukur sesuai dengan Pedoman Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB.

Perbandingan target dan realisasi IKK “Nilai Zona Integritas” dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Faktor pendukung atas ketercapaian target yaitu, adanya inovasi internal seperti TESINT (Tes Integritas) dan eksternal seperti *Dashboard* IEPK dan SiLapisketan.

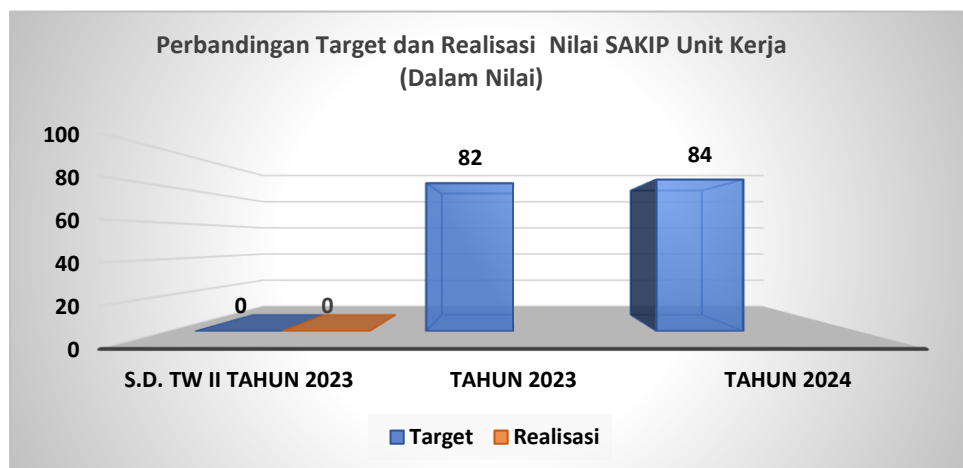
2) IKK: Nilai SAKIP Unit Kerja

Belum ada realisasi Nilai SAKIP Unit Kerja s.d. triwulan II tahun 2023.

Target IKK “Nilai SAKIP Unit Kerja” pada tahun 2023 sebesar 82. Sampai dengan triwulan II tahun 2023 belum ada realisasi karena belum dilakukan *Self Assesment* SAKIP yang kemudian dilakukan *Quality Assurance* (QA) oleh Inspektorat BPKP.

IKK “Nilai SAKIP” diukur dengan hasil *Self Assesment* SAKIP yang telah dilakukan *Quality Assurance* (QA) oleh Inspektorat BPKP.

Perbandingan target dan realisasi IKK “Nilai SAKIP Unit Kerja” dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Penilaian Mandiri (*Self Assessment*) SAKIP belum dilaksanakan karena menunggu arahan dari biro MKOT dan berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya dilaksanakan di triwulan III tahun berjalan.

3) IKK: Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja)

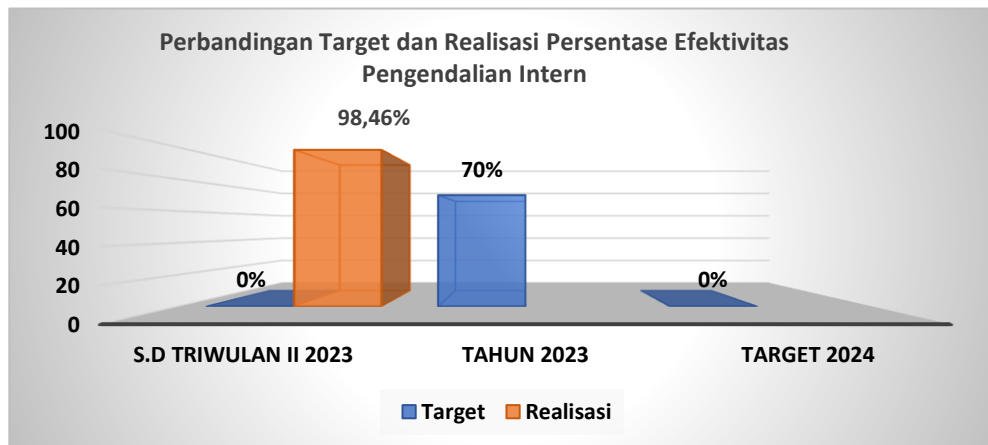
Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja) s.d. triwulan II tahun 2023 sebesar 98,46

Target IKK “Persentase Efektivitas Pengendalian Intern” pada tahun 2023 sebesar 70. Sampai dengan triwulan II tahun 2023 telah terealisasi sebesar 98,46 berdasarkan aplikasi *Risk Management Information System* (RMIS).



IKK “Efektivitas Pengendalian Intern” dihitung dengan perhitungan (jumlah pengendalian *existing* yang efektif + jumlah RTP yang selesai dan efektif) / (jumlah seluruh pengendalian *existing* + jumlah RTP yang selesai) x 100%.

Perbandingan target dan realisasi capaian IKK “Persentase Penyelesaian RTP” dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



4) IKK: Persentase Penyelesaian RTP (MR Unit Kerja)

Realisasi Persentase Penyelesaian RTP (MR Unit Kerja) s.d. triwulan II tahun 2023 sebanyak 50,00%.

Target IKK “Persentase Penyelesaian RTP” pada tahun 2023 sebesar 100%.

Realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebesar 50,00% dari target tahun 2023 sebesar 100%.

IKK “Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Unit Kerja” dihitung berdasarkan (jumlah RTP yang diselesaikan / jumlah RTP) x 100%. Penilaian ini digunakan dalam rangka menilai penerapan manajemen risiko pada unit kerja. Berdasarkan aplikasi yang digunakan oleh unit kerja yaitu RMIS.

Perbandingan target dan realisasi capaian IKK “Persentase Penyelesaian RTP” dapat dilihat pada grafik dibawah ini:





Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko di Lingkungan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta triwulan I tahun 2023 yang merupakan keluaran dari aplikasi *Risk Management Information System* (RMIS) terdapat 2 (dua) rencana tindak pengendalian untuk risiko prioritas sebagai berikut:

- Bidang Investigasi terkait penilaian IEPK
Risiko yang teridentifikasi yaitu auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan dalam penugasan *Consulting* (bimbingan teknis, asistensi, sosialisasi).
Untuk rencana tindak pengendaliannya (RTP) yaitu melakukan PPM terkait penilaian IEPK pada badan Usaha. RTP ini belum dilaksanakan karena masih menunggu pedoman penilaian IEPK pada badan usaha.
- Bidang Akuntan Negara terkait penugasan penilaian MRI BLUD/BUMD
Risiko yang teridentifikasi yaitu tim tidak menemukan AOI/Kelemahan penerapan GCG/MR/Satuan Pengawas Intern/Sistem Pengendalian Internal.
Untuk rencana tindak pengendaliannya yaitu melakukan *brainstorming* sebelum melaksanakan penugasan terkait Manajemen Risiko sudah ditindaklanjuti dengan Program Pelatihan Mandiri (PPM) terkait materi Manajemen Risiko pada BLUD dan BUMD yang dilaksanakan pada bulan Februari 2023.

5) IKK: Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja

Realisasi Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja s.d. triwulan II tahun 2023 sebesar 88,32.

Target IKK “Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja” pada tahun 2023 sebesar 75. Realisasi Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja s.d. triwulan II tahun 2023 sebesar 88,32 atau mencapai



117,76 % dari target tahun 2023. Bila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2020-2024 telah tercapai 109,04% dari target sebesar 81.

IKK “Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja” Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta diukur dengan hasil survey kepada para mitra di lingkungan unit kerja.

Berdasarkan laporan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat tahun 2023 Nomor OT.06/LPP-82/PW12/1/2023 tanggal 12 April 2023 nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 3,533 (sangat baik) dengan skor skala 4, dan jika dikonversi dengan skor skala 100 mendapat nilai sebesar 88,32.

Perbandingan target dan realisasi IKK “Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja” dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Faktor pendukung atas tercapainya target yaitu antara lain:

- 1) Berkoordinasi dengan BPKP Pusat terkait penjadwalan penugasan dan revisi penugasan yang dilakukan;
- 2) Meningkatkan koordinasi internal Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta terkait *updating* penugasan yang akan dan telah dilakukan;
- 3) Berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja Instansi Vertikal yang ada di wilayah kerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta terkait kesiapan pelaksanaan penugasan.

6) IKK: Skor IKPA Unit Kerja

Realisasi Skor IKPA Unit Kerja s.d. triwulan II tahun 2023 sebesar 99,97.

Target IKK “Skor IKPA Unit Kerja” tahun 2023 sebesar 95. Realisasi s.d. triwulan II tahun 2023 sebesar 99,97 atau



• UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1:
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
• Silakan pindai kode QR dengan menggunakan aplikasi resmi dari BSR.E untuk memastikan bahwa dokumen ini adalah asli.

mencapai 105,22% dari target tahun 2023 atau target akhir periode Renstra tahun 2020-2024 sebesar 95.

IKK "Skor IKPA" diukur dengan skor Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.

Realisasi skor IKPA sebesar 99,97 berdasarkan perhitungan/penetapan dari Kementerian Keuangan setelah rekonsiliasi capaian output.

Perbandingan target dan realisasi IKK "Skor IKPA Unit Kerja" dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Faktor pendukung atas ketercapaian target antara lain adanya keselarasan antara perencanaan dan penyerapan anggaran.

7) IKK: Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja

Belum ada realisasi Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja s.d. triwulan II tahun 2023.

Target IKK "Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja" pada tahun 2023 sebesar 80. Sampai dengan triwulan II tahun 2023 belum ada realisasi.

IKK "Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja" diukur dengan hasil penilaian pengelolaan BMN yang dilakukan secara *self assessment* dan kemudian divalidasi oleh Biro Umum.

Perbandingan target dan realisasi "Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja" dapat dilihat pada grafik berikut:





Nilai pengelolaan BMN sampai dengan triwulan II tahun 2023 belum ada realisasi karena penilaian pengelolaan BMN dilaksanakan pada akhir tahun 2023.

Rincian target dan realisasi *outcome* sesuai Perjanjian Kinerja Sampai dengan triwulan II tahun 2023 dapat dilihat pada Lampiran 1.

3. Agenda Prioritas Pengawasn (APP) yang mendukung ketercapaian setiap sasaran kegiatan

a. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah

Agenda Prioritas Pengawasn (APP) yang telah dilaksanakan untuk mendukung ketercapaian sasaran kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah yaitu:

- **Optimalisasi PAD**

Kegiatan pengawasan OPAD dilakukan untuk mengevaluasi peraturan dan kebijakan terkait PAD; menganalisis potensi, target, dan realisasi kinerja PAD; mengevaluasi basis data dan teknologi informasi; mengevaluasi pemanfaatan aset daerah; mengevaluasi efektivitas manajemen risiko pada pengelolaan PAD; dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan/percepatan implementasi.

- **Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah**

Kegiatan pengawasan terhadap Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengidentifikasi



permasalahan inti yang terjadi serta menghasilkan data mengenai potensi efektivitas dan efisiensi dari sisi perencanaan dan penganggaran; potensi ketercapaian tujuan pada sektor pariwisata, pangan, dan sektor andalan daerah; efektivitas desain dan implementasi manajemen risiko terkait proses perencanaan dan penganggaran; permasalahan dalam perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah; dan pemberian rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan dan penganggaran tahun berjalan dan tahun berikutnya.

- **Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu**

Kegiatan pengawasan atas Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu dilakukan untuk menilai apakah perencanaan dan penganggaran terkait penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan pada KPU dan Bawaslu telah memadai; pengelolaan dana penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan (termasuk dana hibah) pada KPU dan Bawaslu telah dilakukan dengan memenuhi prinsip disiplin anggaran; risiko *fraud* pengelolaan dana penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan pada KPU dan Bawaslu telah diidentifikasi dan dikelola secara memadai; hambatan belanja penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan pada KPU dan Bawaslu tidak berpengaruh secara signifikan kepada sasaran yang diharapkan; dan pertanggungjawaban keuangan Pemilu dan Pemilihan pada KPU dan Bawaslu telah dilaksanakan secara akuntabel.

- **Akuntabilitas Pengamanan dan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah**

Pengawasan atas Akuntabilitas Pengamanan dan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan terhadap aspek Sumber Daya Manusia (SDM), Keuangan, Kebijakan, Infrastruktur/Sarana dan Prasarana/Teknologi pada unit kerja K/L/D yang terlibat dalam kegiatan pengamanan dan pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak, dengan fokus pengawasan pada:

- 1) Pengelolaan risiko pengamanan dan pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak;
- 2) Akuntabilitas pengamanan dan pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak;



- 3) *Delivery* peran lembaga pengamanan dan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak termasuk peran Pemerintah Daerah; dan
 - 4) Hambatan pelaksanaan pengamanan dan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak
- **Pengendalian Kecurangan dan Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP)**

Kegiatan pengawasan atas Pengendalian Kecurangan dan HKP dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas penerapan pengendalian kecurangan oleh K/L/D/BU melalui profil risiko kecurangan tematik dan profil risiko HKP tematik, rekomendasi kebijakan untuk peningkatan pengendalian kecurangan (*lesson learned* dari pencegahan, deteksi dan respon kecurangan) dan rekomendasi kebijakan untuk penyelesaian HKP.
 - **Audit atas Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri**

Merupakan Audit Dukungan atas Laporan Keuangan Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri yang mencakup audit terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan proyek, penilaian terhadap efektivitas pengendalian intern, dan ketaatan terhadap ketentuan program.

Lingkup audit keuangan mencakup pengujian kebenaran dan keakuratan jumlah/saldo dalam laporan keuangan, serta pengujian terhadap pengeluaran keuangan program, yang mencakup kebenaran perhitungan matematis (*accuracy*), kelengkapan (*completeness*), validitas (*validity*), prosedur analitis (*analytical procedure*), keberadaan (*existence*), serta penetapan titik pisah (*cut off*).
 - **Pengawasan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

Kegiatan pengawasan BOS untuk mencakup analisis perencanaan dan ketepatan alokasi dana BOS, kelancaran penyaluran dana BOS, ketepatan dan akuntabilitas penggunaan anggaran BOS, kecukupan dan kebermanfaatan dana BOS dalam memenuhi kebutuhan operasional sekolah, efektifitas dana BOS dalam mendorong aksesibilitas pendidikan, hambatan penyaluran dan pemanfaatan dana BOS, serta rekomendasi perbaikan kebijakan/ implementasi.



b. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional

Agenda Prioritas Pengawasan (APP) yang telah dilaksanakan untuk mendukung ketercapaian sasaran Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional yaitu:

- Pengawasan Proyek Strategis Nasional (Triwulanan)

Tujuan dilakukan kegiatan pengawasan atas Proyek Strategis Nasional adalah untuk memperoleh perkembangan capaian progres fisik dan keuangan PSN; mengidentifikasi hambatan terhadap percepatan pelaksanaan PSN serta alternatif solusi terhadap hambatan, termasuk identifikasi hambatan tersebut pada satker/instansi terkait; mengidentifikasi peraturan yang menghambat percepatan pelaksanaan PSN; mengidentifikasi efektivitas pencapaian target output PSN; serta memberikan usulan alternatif solusi terhadap hambatan, ketidاكلancaran, ketidaktaatan, dan ketidakefektifan pencapaian target output PSN.

- Program Ekonomi Biru D.I. Yogyakarta

Kegiatan pengawasan atas Program Ekonomi Biru D.I. Yogyakarta dilakukan untuk menilai keselarasan, ketepatan dan pelaksanaan kebijakan perikanan tangkap serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan D.I. Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kulon Progo, serta Gunungkidul yang terkait dengan Ekonomi Biru; menilai tata kelola program perikanan tangkap serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan D.I. Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kulon Progo, serta Gunungkidul yang terkait dengan Ekonomi Biru; menilai keselarasan perencanaan dan penganggaran program perikanan antar perangkat daerah dan antar pemerintah daerah di D.I. Yogyakarta; menilai akuntabilitas keuangan dan kinerja perikanan tangkap serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan D.I. Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kulon Progo, serta Gunungkidul yang terkait dengan Ekonomi Biru; menilai kesinambungan program perikanan tangkap serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan D.I. Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kulon Progo, serta Gunungkidul yang terkait dengan Ekonomi Biru; menilai efektivitas program perikanan tangkap serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan D.I. Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kulon Progo, serta Gunungkidul yang terkait dengan Ekonomi Biru; mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan dan memberikan rekomendasi perbaikan.



- **Program Jogja Smart Province (JSP)**

Pengawasan atas Program Jogja Smart Province (JSP) dilakukan untuk menilai keselarasan, ketepatan dan pelaksanaan kebijakan JSP dan pariwisata; menilai tata kelola Program JSP dan pariwisata; menilai keselarasan perencanaan dan penganggaran program pariwisata; menilai akuntabilitas keuangan dan kinerja pariwisata; menilai kesinambungan JSP dan program pariwisata antar periode; menilai dampak JSP terhadap peningkatan kunjungan dan lama tinggal wisatawan di DIY; dan mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan dan memberikan rekomendasi perbaikan.

c. **Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha**

Agenda Prioritas Pengawasan (APP) yang telah dilaksanakan untuk mendukung ketercapaian sasaran kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha yaitu:

- **BUMD (Fokus pada Bank Pembangunan Daerah)**

Pengawasan atas BUMD dengan fokus pada Bank Pembangunan Daerah dilakukan untuk melakukan evaluasi atas capaian kontribusi BPD pada pembangunan daerah selama periode tahun buku tertentu dan mengevaluasi kualitas GRCC, kinerja keuangan dan operasional terhadap capaian tersebut.

- **BUMD (Fokus pada Jasa Air)**

Latar belakang pelaksanaan pengawasan adalah adanya permintaan dari Kementerian PUPR dan APP dari BPKP untuk secara kontinyu mengumpulkan bahan yang dapat digunakan untuk penyusunan program untuk peningkatan kinerja BUMD Air Minum dan penyusunan rencana pengawasan intern yang sesuai dengan kondisi BUMD Air Minum. Dalam hal ini, pengawasan dilakukan atas kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) yang ada di wilayah kerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta. Melalui pengawasan tersebut diharapkan dapat diperoleh hasil penilaian atas pencapaian kinerja PDAM Tahun Buku 2022 dan memberikan saran perbaikan dalam upaya peningkatan kinerja perusahaan.

- **BUMD (Fokus BUMD Aneka Usaha)**

Kegiatan pengawasan atas kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Aneka Usaha adalah untuk memperoleh hasil penilaian atas capaian kinerja BUMD



Tahun 2022 dan memberikan saran perbaikan dalam upaya peningkatan kinerja perusahaan.

- **BLU/D (Fokus pada BLU/D Layanan Kesehatan - Rumah Sakit dan BLU/D Pengelolaan Dana)**

Kegiatan pengawasan atas kinerja BLUD bertujuan untuk mengukur tingkat capaian kinerja pengelolaan RSUD sebagai BLUD Tahun 2022 dan memberikan rekomendasi perbaikan dalam upaya peningkatan kinerja BLUD-RSUD, sehingga dapat memastikan bahwa tujuan BLUD tersebut dapat tercapai melalui penerapan praktik bisnis yang sehat berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Kepala Daerah.

d. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi

Agenda Prioritas Pengawasan (APP) yang mendukung ketercapaian sasaran kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi yaitu:

- **Pengendalian Kecurangan dan Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP)**

Penugasan pengawasan ini diharapkan mampu mengidentifikasi profil risiko kecurangan dan profil risiko HKP, serta diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk peningkatan pengendalian kecurangan dan penyelesaian HKP.

- **Akuntabilitas atas pengelolaan anggaran pemilu**

Tujuan Pengawasan atas Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu dan Pemilihan pada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah untuk Perencanaan dan penganggaran terkait penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan pada KPU dan Bawaslu telah memadai; Pengelolaan dana penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan (termasuk dana hibah) pada KPU dan Bawaslu telah dilakukan dengan memenuhi prinsip disiplin anggaran; Risiko *fraud* pengelolaan dana penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan pada KPU dan Bawaslu telah diidentifikasi dan dikelola secara memadai; Hambatan belanja penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan pada KPU dan Bawaslu tidak berpengaruh secara signifikan kepada sasaran yang diharapkan; Pertanggungjawaban keuangan Pemilu dan Pemilihan pada KPU dan Bawaslu telah dilaksanakan secara akuntabel.



e. Sasaran Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU

Agenda Prioritas Pengawasan (APP) yang telah dilaksanakan untuk mendukung ketercapaian sasaran kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU yaitu:

- Kapabilitas APIP Pemerintah Daerah

Pengawasan Kapabilitas APIP Pemerintah Daerah diharapkan mampu menggambarkan kondisi kapabilitas aparat pengawas internal, peningkatan kapabilitas dan kualitas tata kelola, mengidentifikasi hambatan, dan Identifikasi ruang perbaikan dan saran langkah perbaikan kebijakan pengawas internal pada K/L/D/BU.

- Maturitas SPIP/MRI Pemerintah Daerah

Pengawasan Maturitas SPIP/MRI Pemerintah Daerah diharapkan mampu menggambarkan kondisi kualitas pelaksanaan SPIP/MRI, efektivitas penyelenggaraan SPIP/MRI terhadap peningkatan kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah, identifikasi hambatannya, mengidentifikasi *Best practice* penyelenggaraan SPIP/MR, dan Identifikasi ruang perbaikan dan saran langkah kebijakan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPIP/MR.

- Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Daerah (SAKIP)

Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Daerah dilaksanakan dengan Bimbingan Teknis Rencana Aksi Peningkatan Kinerja dalam perbaikan kualitas perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal sehingga penyusunan Laporan AKIP Tahun 2023 lebih baik.

- Akuntabilitas Keuangan Desa

Penugasan akuntabilitas keuangan desa ini diharapkan untuk analisis capaian realisasi belanja dan pendapatan desa; memotret permasalahan pengelolaan keuangan desa (pemanfaatan, efisiensi, dan potensi kecurangan); melakukan analisis efektivitas kegiatan mitigasi dampak inflasi daerah pada tingkat desa (fokus pada PKTD dan penyaluran dana bergulir masyarakat); dan memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.

- Akuntabilitas Aset Desa

Sasaran dari Penugasan Akuntabilitas Aset Desa adalah untuk menganalisa kebijakan dan tata kelola Aset Desa (analisis ketepatan, keselarasan, dan kecukupan kebijakan); mengidentifikasi profil pengelolaan Aset Desa (perencanaan, pengadaan, pencatatan dan pelaporan, serta pengamanan



Aset Desa); efektivitas pemanfaatan Aset Desa untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat desa dan peningkatan PADes; menganalisis pengelolaan Aset Desa yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

4. Rencana dan Realisasi *Output*

a. Rencana Rincian *Output* Pengawasan

Berdasarkan Revisi RKAKL tahun 2023 tanggal 29 Mei 2023 dan Aplikasi SIMA sampai dengan 25 Juni 2023, target pengawasan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta tahun 2023 beserta anggarannya sebagai berikut:

No.	Kode	Program/Kegiatan/Rincian <i>Output</i> (RO)	Target RO	Anggaran (Rp)	Bidwas	Topik	PKPT
A	FAG	Pengawasan Pembangunan (<i>Baseline</i>)					
1	3701.FAG.711	Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut	2	150.000.000	P3APIP	1	2
2	3701.FAG.U11	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara, Daerah dan Desa	5	278.939.000	IPP	1	1
					APD	7	7
					Investigasi	1	1
3	3701.FAG.U31	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan dan BLU/BLUD	5	130.928.000	AN	6	7
		Jumlah A	12	559.867.000		16	18
B	FAG	Pengawasan Pembangunan (Penambahan)					
1	3701.FAG.028	Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah	23	1.058.766.000	IPP	14	14
					APD	11	11
					AN	3	3
					Investigasi	5	5
					P3APIP	1	1
		Jumlah B	23	1.058.766.000		34	34
C	UAG	Pengawasan Pembangunan (<i>Baseline</i>)					
1	3701.UAG.U21	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Sumber Daya Manusia	8	317.520.000	IPP	9	9
					APD	3	3
					AN	2	2
2	3701.UAG.U22	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Infrastruktur dan Konektivitas	7	223.432.000	IPP	10	10
					APD	2	2
					AN	3	3
3	3701.UAG.U23	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Ekonomi	6	296.352.000	IPP	5	5
					APD	5	6
					AN	2	2



No.	Kode	Program/Kegiatan/Rincian Output (RO)	Target RO	Anggaran (Rp)	Bidwas	Topik	PKPT
					Investigasi	1	1
4	3701.UAG.U24	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan	1	42.336.000	IPP	1	1
5	3701.UAG.U27	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Daerah	2	115.200.000	APD	2	2
6	3701.UAG.U41	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Kecurangan	2	109.657.000	Investigasi	1	1
7	3701.UAG.U52	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	7	802.435.000	APD	2	2
					P3APIP	2	3
8	3701.UAG.U53	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	4	105.840.000	AN	1	1
Jumlah C			37	2.012.772.000		51	53
Jumlah			72	3.631.405.000		101	105

Keterangan:

*) Jumlah topik pengawasan dalam aplikasi SIMARen sebanyak 80 topik. Jumlah 101 topik pengawasan karena terdapat satu topik yang diampu oleh lebih dari satu bidang.

Rincian topik dapat dilihat pada Lampiran 2.

b. Realisasi Rincian Output (RO) PKPT

Realisasi rincian output (berdasarkan SHP yang sudah final) sampai dengan triwulan II tahun 2023 (per 23 Juni 2023) disajikan sebagai berikut:

Target dan Realisasi RO Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta tahun 2023

No	Kode	Program/Kegiatan/Rincian Output (RO)	Target RO	Realisasi	Capaian (%)
A	FAG	Pengawasan Pembangunan (Baseline)			
1	3701.FAG.711	Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut	2	2	100,00
2	3701.FAG.U11	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara, Daerah dan Desa	5	4	80,00
3	3701.FAG.U31	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan dan BLU/BLUD	5	5	100
Jumlah A			12	11	91,67
B	FAG	Pengawasan Pembangunan (Penambahan)			
1	3701.FAG.028	Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah	23	12	52,17
Jumlah B			23	12	52,17



• UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1:
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
 • Silakan pindai kode QR dengan menggunakan aplikasi resmi dari BSR.E untuk memastikan bahwa dokumen ini adalah asli.



No	Kode	Program/Kegiatan/Rincian Output (RO)	Target RO	Realisasi	Capaian (%)
C	UAG	Pengawasan Pembangunan (Baseline)			
1	3701.UAG.U21	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Sumber Daya Manusia	8	6	75,00
2	3701.UAG.U22	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Infrastruktur dan Konektivitas	7	7	100,00
3	3701.UAG.U23	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Ekonomi	6	6	100,00
4	3701.UAG.U24	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan	1	-	-
5	3701.UAG.U27	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Daerah	2	2	100,00
6	3701.UAG.U41	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Kecurangan	2	1	50,00
7	3701.UAG.U52	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	7	-	-
8	3701.UAG.U53	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	4	-	-
Jumlah C			37	22	59,46
Jumlah			72	45	62,50

Rincian Realisasi *Output* dapat dilihat pada lampiran 3.

c. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) atas pelaksanaan (PKPT)

Berdasarkan data km12 dari aplikasi *new monsima* per tanggal 23 Juni 2023 telah terbit surat tugas sebanyak 271 surat tugas (ST) dan 158 laporan atau 58,30 dari ST yang terbit. Realisasi PKPT s.d. triwulan II 2023 sebanyak 51 PKPT atau 48,57 dari rencana PKPT tahun 2023 sebanyak 105 PKPT. Realisasi PKPT mengacu pada penerbitan laporan. Rincian realisasi PKPT, penerbitan ST, dan penerbitan Laporan Hasil Pengawasan disajikan pada tabel dibawah ini:

No.	Bidang	Target	Realisasi			Capaian (%)	% Realisasi LHP Dibandingkan Realisasi ST
		PKPT	PKPT	ST	Lap	PKPT	
1	2	3	4	5	6	7=4/3	8=6/5
1	IPP	40	17	67	43	42,50	64,18
2	APD	33	18	74	44	54,55	59,46
3	AN	18	9	47	24	50,00	51,06
4	Investigasi	8	4	48	32	50,00	66,67
5	P3A	6	3	35	15	50,00	42,86
Jumlah		105	51	271	158	48,57	58,30



d. Target dan Realisasi Program Dukungan Manajeme (PKAU)

Realisasi Rincian *Output* (RO) sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebagai berikut:

No	Kode	Program Dukungan Manajemen	Anggaran	Bobot Tertimbang (%)	Target RO	Realisasi RO	Capaian (%)	Cap fisik tertimbang
1	2	3	4	5	6	7	8 =7/8	9=8x5
1	3676.EBA.962	Layanan Umum	547.530.000	1,85	1 Layanan (12 bulan)	1 layanan (6 bulan)	50,00	0,93
2	3676.EBA.994	Layanan Perkantoran	28.324.142.000	95,80	1 Layanan (12 bulan)	1 layanan (6 bulan)	50,00	47,90
3	3676.EBB.951	Layanan Sarana Internal	100.000.000	0,34	1 Unit	1 Unit	100,00	0,34
4	3676.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	595.488.000	2,01	3 Unit	0	0,00	0,00
Jumlah Program Dukungan Manajemen			29.567.160.000	100%	Capaian rata-rata tertimbang		49,16	

5. Penggunaan Dana dan Analisis Efisiensinya

a. Target dan Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran s.d. triwulan II tahun 2023 (per 23 Juni 2023) sebesar Rp15.582.071.770,00 atau 46,94% dari anggaran tahun 2023 sebesar Rp33.210.975.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Program Pengawasan Pembangunan (CH)	3.631.405.000	1.003.825.997	27,64
2	Program Dukungan Manajemen (WA)	29.567.160.000	14.578.245.773	49,31
Jumlah		33.321.975.000	15.582.071.770	46,94

Rincian realisasi anggaran dapat dilihat pada lampiran 4

b. Analisis Efisiensi Penggunaan Dana

Perbandingan realisasi anggaran dan capaian rincian output Perwakilan D.I. Yogyakarta s.d triwulan II tahun 2023 sebagai berikut:

No	Program	Anggaran (Rp)	Bobot (%)	Realisasi keuangan (Rp)	% realisasi keuangan	Capaian Rincian Output %	
						realisasi	tertimbang
1	2	3	4	5	6=5/3	7	8=7x4
1	Program Pengawasan Pembangunan	3.631.405.000	10,94	1.003.825.997	27,64	62,50	6,84
2	Program Dukungan Manajemen	29.567.160.000	89,06	14.578.245.773	49,31	49,16	43,78
Jumlah		33.210.975.000	100	15.582.071.770	46,94	Rata-rata	50,62



Berdasarkan tabel diatas, penggunaan dana telah efisien. Hal tersebut terlihat dari capaian *output* sebesar 50,62%, lebih besar daripada capaian penggunaan dana sebesar 46,94 %.

6. Penggunaan SDM dan Analisis Efisiensinya

a. Target dan Realisasi Penggunaan SDM Pengawasan PKPT

Realisasi penggunaan hari produktif pengawasan PKPT sampai dengan triwulan II tahun 2023 adalah sebanyak 6.616 OH atau 33,41% dari rencana hari pengawasan satu tahun sebanyak 19.802 OH dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

No.	Bidwas	Target OH	Realisasi OH	%
Pengawasan				
1	IPP	4.054	1.733	42,75
2	APD	2.282	2.611	114,42
3	AN	1.998	1.085	54,30
4	Investigasi	1.530	784	51,24
5	P3A	9.938	403	4,06
Jumlah OH Pengawasan		19.802	6.616	33,41

b. Analisis Efisiensi Penggunaan SDM

Dilihat dari sisi penggunaan OH pengawasan, penggunaan OH pengawasan telah efisien. Hal tersebut terlihat dari capaian output pengawasan sebesar 62,50%, lebih besar daripada capaian penggunaan OH pengawasan sebesar 33,41%. Analisis efisiensi digambarkan pada table berikut:

No	Program	% Capaian Output	% realisasi OH	Simpulan
1	Program Pengawasan Pembangunan	62,50	33,41	Telah efisien

7. Penghargaan/Inovasi

Penghargaan yang pernah diperoleh Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta sebagai berikut:

a. Tahun 2021

Pada tahun 2021 Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta sebagai Juara I Kategori Instansi Vertikal D.I. Yogyakarta dari Komisi Informasi Daerah D.I. Yogyakarta (Penganugerahan Keterbukaan Layanan Informasi Publik).



b. Tahun 2022

Pada tahun 2022 Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta mendapatkan penghargaan sebagai berikut:

- Peringkat II Kategori Instansi Vertikal D.I. Yogyakarta dari Komisi Informasi Daerah D.I. Yogyakarta (Penganugerahan Keterbukaan Layanan Informasi Publik);
- Peringkat V Satker dengan Capaian IKPA Tertinggi Periode Semester I TA 2022 Kategori Pagu Besar Lingkup Kantor Wilayah DJPb D.I. Yogyakarta;
- Predikat Terbaik Ketiga Kategori Pengelolaan Data dan Penilaian Kinerja dalam Forum Kepegawaian BPKP 2022;
- Satker Pemenang Program SV *Boosting* pada Satker *Contest* sebagai Pencapaian SV Tertinggi Wilayah DIY Periode 1 Kartu Kredit Pemerintah dari Bank Mandiri.

c. Tahun 2023

Belum ada penghargaan yang diperoleh.

Sedangkan Inovasi dalam proses pengembangan yaitu *dashboard* kapabilitas APIP dan Aplikasi Audit Penyesuaian Harga.

Demikian kami sampaikan Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta s.d. triwulan II tahun 2023. Atas perkenan Bapak Kepala, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Adi Gemawan

Pegawai BPKP dalam melaksanakan tugas tidak menerima/meminta gratifikasi dan suap. Apabila Pegawai menerima/meminta gratifikasi dan suap, dapat dilaporkan melalui mekanisme penyampaian pengaduan pada wbs.bkp.go.id. atau menghubungi 085210991239



• UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1:
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
• Silakan pindai kode QR dengan menggunakan aplikasi resmi dari BSR.E untuk memastikan bahwa dokumen ini adalah asli.



**Target dan Realisasi Outcome Sesuai Perjanjian Kinerja
s.d. Triwulan II Tahun 2023
Perwakilan BPKP DIY**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target		Realisasi s.d. TW II	Capaian (%)		
				2023	s.d. TW II		2023	s.d. TW II	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5	9=7/6	
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	1.1	Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rupiah (Juta)	2.494,00	2.494,00	40,95	1,64	1,64
		1.2	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rupiah (Juta)	136.261,00	136.261,00	226.385,43	120,00	120,00
		1.3	Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rupiah (Juta)	56.684,00	230,00	684,56	1,21	120,00
Capaian Rata-rata sasaran 1							40,95	80,55	
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	2.1	Jumlah Proyek Strategis Nasional yang tercapai sesuai target	PSN	1,00	1,00	2,00	120,00	120,00
		2.2	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	(%) Persen	85,00	85,00	0,00	-	-
		2.3	Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi	Kegiatan Prioritas Daerah	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
Capaian Rata-rata sasaran 2							73,33	73,33	
3	Meningkatnya Kesadaran perbaikan tata kelola pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP	3.1	Persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti	(%) Persen	80,00	0,00	22,73	28,41	#DIV/0!
Capaian Rata-rata sasaran 3							28,41	#DIV/0!	
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	4.1	Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMD	1,00	0,00	2,00	120,00	#DIV/0!
		4.2	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	11,00	0,00	12,00	109,09	#DIV/0!
		4.3	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	2,00	0,00	2,00	100,00	#DIV/0!
		4.4	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	35,00	0,00	0,00	-	#DIV/0!
		4.5	Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa	BUMDes	10,00	0,00	0,00	-	#DIV/0!
Capaian Rata-rata sasaran 4							65,82	#DIV/0!	



- UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
- Silakan pindai kode QR dengan menggunakan aplikasi resmi dari BSR.E untuk memastikan bahwa dokumen ini adalah asli.



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target		Realisasi s.d. TW II	Capaian (%)		
				2023	s.d. TW II		2023	s.d. TW II	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5	9=7/6	
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	5.1	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	(%) Persen	100,00	0,00	50,00	50,00	#DIV/0!
		5.2	Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	(%) Persen	85,00	75,00	100,00	117,65	120,00
		5.3	Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Pemda	3,00	0,00	4,00	120,00	#DIV/0!
		5.4	Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Badan Usaha	1,00	0,00	0,00	-	#DIV/0!
Capaian Rata-rata sasaran 5							71,91	#DIV/0!	
6	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	6.1	Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP >= Level 3	Provinsi	1,00	0,00	1,00	100,00	#DIV/0!
		6.2	Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP >= Level 3	Kabupaten/Kota	11,00	0,00	11,00	100,00	#DIV/0!
		6.3	Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP >= Level 3	Provinsi	1,00	0,00	1,00	100,00	#DIV/0!
		6.4	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP >= Level 3	Kabupaten/Kota	11,00	0,00	10,00	90,91	#DIV/0!
		6.5	Jumlah Provinsi dengan MRI >= Level 3	Provinsi	1,00	0,00	1,00	100,00	#DIV/0!
		6.6	Jumlah Kab/Kota dengan MRI >= Level 3	Kabupaten/Kota	5,00	0,00	3,00	60,00	#DIV/0!
		6.7	Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Pemda	9,00	4,00	8,00	88,89	120,00
		6.8	Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel	Desa	25,00	25,00	40,00	120,00	120,00
		6.9	Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	25,00	25,00	321,00	120,00	120,00
		6.10	Jumlah BUMD dengan MRI >= Level 3	BUMD	1,00	0,00	0,00	-	#DIV/0!
		6.11	Jumlah BLU/D dengan MRI >= Level 3	BLU/D	5,00	0,00	4,00	80,00	#DIV/0!
		6.12	Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI >= Level 3	BUMD	2,00	0,00	1,00	50,00	#DIV/0!
		6.13	Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI >= Level 3	BLU/D	1,00	0,00	2,00	120,00	#DIV/0!
Capaian Rata-rata sasaran 6							86,91	#DIV/0!	



- UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.
- Silakan pindai kode QR dengan menggunakan aplikasi resmi dari BSrE untuk memastikan bahwa dokumen ini adalah asli.



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target		Realisasi s.d. TW II	Capaian (%)		
				2023	s.d. TW II		2023	s.d. TW II	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5	9=7/6	
7	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Unit Kerja	7,1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	75,00	0,00	88,01	117,35	#DIV/0!
		7,2	Nilai SAKIP Unit Kerja	(%) Persen	82,00	0,00	0,00	-	#DIV/0!
		7,3	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja)	(%) Persen	70,00	0,00	98,46	120,00	#DIV/0!
		7,4	Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	(%) Persen	100,00	0,00	50,00	50,00	#DIV/0!
		7,5	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja	Indeks Skala 100	75,00	0,00	88,32	117,76	#DIV/0!
		7,6	Skor IKPA Unit Kerja	Indeks Skala 100	95,00	0,00	99,97	105,23	#DIV/0!
		7,7	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Indeks Skala 100	80,00	0,00	0,00	-	#DIV/0!
Capaian Rata-rata sasaran 7							72,91	#DIV/0!	
Capaian Rata-rata Total							62,89	#DIV/0!	



- UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.
- Silakan pindai kode QR dengan menggunakan aplikasi resmi dari BSrE untuk memastikan bahwa dokumen ini adalah asli.



**JUMLAH TOPIK TAHUN 2023 PADA APLIKASI SIMAREN
PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA**

No.	Topik	Bidwas	ID PKPT	Kode RO
1	Akses Permodalan UMKM	AN	110385	3701.UAG.00.U23
		IPP	108417	3701.UAG.00.U23
2	Akuntabilitas dan Tata Kelola Keuangan BUMDesa	AN	113067	3701.FAG.00.U31
3	Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	Investigasi	114522	3701.FAG.00.U11
4	Akuntabilitas penanganan Covid-19	APD	115035	3701.UAG.00.U21
		IPP	108408	3701.UAG.00.U21
5	Akuntabilitas Pengadaan Logistik dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Investigasi	108641	3701.FAG.51.028
6	Akuntabilitas Pengamanan dan Pengawasan	IPP	108653	3701.FAG.51.028
7	Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu	AN	109766	3701.FAG.51.028
		Investigasi	114217	3701.FAG.51.028
		IPP	108400	3701.FAG.51.028
8	Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Desa	APD	108392	3701.FAG.51.028
9	Akuntabilitas Aset Desa	APD	108386	3701.FAG.51.028
10	Akuntabilitas Keuangan Desa	APD	108385	3701.FAG.00.U11
11	Analisis Fiskal dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	APD	114229	3701.FAG.00.U11
12	Audit atas Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri	IPP	114223	3701.FAG.51.028
13	Audit Kinerja Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK)	IPP	114682	3701.UAG.00.U22
14	Audit Kinerja Pengembangan Infrastruktur Sosial ekonomi Wilayah (PISEW)	IPP	114220	3701.UAG.00.U22
15	Bantuan Operasional Sekolah	IPP	108367	3701.UAG.00.U21
16	Bauran Program Kesejahteraan Sosial	IPP	108398	3701.FAG.51.028
17	Bimtek Implementasi FMIS Pada Pemda	APD	114225	3701.FAG.00.U11
18	BLU/D (Fokus pada BLU/D Layanan Kesehatan - Rumah Sakit dan BLU/D Pengelolaan Dana)	AN	108381	3701.FAG.00.U31
19	BUMD (Fokus pada Bank Pembangunan Daerah)	AN	108377	3701.FAG.00.U31
20	BUMD (Fokus pada BU Jasa Air)	AN	109043	3701.FAG.00.U31
21	BUMD (Fokus pada BUMD Aneka Usaha)	AN	109049	3701.FAG.00.U31
22	BUMN	AN	108515	3701.FAG.00.U31
			112056	3701.FAG.00.U31
23	Dukungan Pengembangan Pariwisata	APD	111622	3701.UAG.00.U23
			112059	3701.UAG.00.U23
		IPP	108414	3701.UAG.00.U23
24	Efektivitas Pengendalian Inflasi Daerah	APD	108364	3701.FAG.51.028
25	Efektivitas Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	APD	109000	3701.FAG.51.028
		IPP	108393	3701.FAG.51.028
26	Efektivitas Transfer ke Daerah	APD	108404	3701.FAG.51.028
27	Implementasi Bansos APBD	APD	108532	3701.FAG.51.028
28	Implementasi Bansos APBDesa	APD	108389	3701.FAG.51.028
29	Infrastruktur Jalan Tol	IPP	108607	3701.UAG.00.U22
30	Infrastruktur Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) dan sanitasi	IPP	108413	3701.UAG.00.U22



No.	Topik	Bidwas	ID PKPT	Kode RO
31	Infrastruktur SPAM	AN	108970	3701.UAG.00.U22
		IPP	108636	3701.UAG.00.U22
32	Kapabilitas APIP - Pemerintah Daerah	P3APIP	108371	3701.UAG.00.U52
33	Kemudahan Perizinan Berusaha	IPP	108379	3701.FAG.51.028
34	Kinerja Pendidikan Tinggi	AN	108969	3701.FAG.51.028
		IPP	108581	3701.FAG.51.028
35	Manajemen Risiko Badan Usaha	AN	109756	3701.UAG.00.U53
36	Maturitas SPIP/MRI - Pemerintah Daerah	APD	108597	3701.UAG.00.U52
37	Optimalisasi PAD	APD	108369	3701.FAG.00.U11
38	P3DN	APD	114215	3701.UAG.00.U23
		AN	110430	3701.UAG.00.U23
		Investigasi	108383	3701.UAG.00.U23
39	Pembangunan Bandara	AN	108982	3701.UAG.00.U22
		IPP	108406	3701.UAG.00.U22
40	Pembangunan Infrastruktur Destinasi Pariwisata (DPSP dan KSPN)	APD	108978	3701.UAG.00.U23
		IPP	108415	3701.UAG.00.U23
41	Pembangunan Jalan dan Jembatan	APD	111685	3701.UAG.00.U22
42	Pembangunan Satu Data Indonesia (SDI)	IPP	108536	3701.FAG.51.028
43	Pemerataan dan Penyediaan Infrastruktur, Akses Internet dan Komunikasi	IPP	108608	3701.UAG.00.U22
44	Penanganan Pasca Panen	Investigasi	108625	3701.FAG.51.028
45	Penanggulangan Hama dan Penyakit	IPP	115034	3701.UAG.00.U24
46	Pengadaan ASN Tahun 2023	IPP	114218	3701.FAG.51.028
47	Pengawasan atas Pengendalian Intern Tata Kelola Desa	APD	113443	3701.UAG.00.U52
48	Pengawasan Proyek Strategis Nasional (Triwulanan)	AN	114219	3701.UAG.00.U22
		IPP	113438	3701.UAG.00.U22
49	Pengawasan Tata Kelola Peredaran Obat	IPP	114550	3701.UAG.00.U21
50	Pengelolaan risiko sektor strategis nasional	APD	108488	3701.FAG.51.028
51	Pengendalian Kecurangan dan Hambatan Kelancaran Pembangunan	Investigasi	108365	3701.UAG.00.U41
52	Penguatan Inovasi dan Teknologi Kesehatan (Digitalisasi Layanan Kesehatan)	IPP	108388	3701.FAG.51.028
53	Penguatan Sistem Pengendalian Penyakit	IPP	108396	3701.FAG.51.028
54	Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Daerah (SAKIP)	APD	114226	3701.FAG.00.U11
55	Peningkatan Kualitas Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (SISWASKEUDES)	P3APIP	114517	3701.FAG.51.028
56	Peningkatan Kualitas Pengelolaan JFA		113439	3701.UAG.00.U52
			113440	3701.UAG.00.U52
57	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa (SISKEUDES)	APD	114515	3701.FAG.51.028
58	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah	APD	108372	3701.FAG.00.U11
59	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Aset Desa	APD	114520	3701.FAG.51.028
60	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing UMKM	APD	108975	3701.UAG.00.U23
		IPP	108418	3701.UAG.00.U23
61	Peningkatan Sarana Prasarana (Sarpras) Pendidikan	IPP	108416	3701.UAG.00.U21
62	Percepatan Penurunan Stunting	APD	109015	3701.UAG.00.U21
		IPP	108362	3701.UAG.00.U21



No.	Topik	Bidwas	ID PKPT	Kode RO
63	Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	APD	108370	3701.FAG.00.U11
64	Perencanaan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan (PAEP dan P3A)	P3APIP	113441	3701.FAG.00.711
			113442	3701.FAG.00.711
65	Program Ekonomi Biru DIY	APD	108234	3701.UAG.00.U27
66	Program Jogja Smart Province (JSP)	APD	108259	3701.UAG.00.U27
67	Program Pembangunan Perumahan Rakyat (Perumahan Khusus dan Rumah Susun, Bantuan Simultan Perumahan Rakyat)	APD	111603	3701.UAG.00.U22
68	Reformasi sistem kesehatan - kualitas dan redistribusi nakes	IPP	108397	3701.UAG.00.U21
69	Reformasi sistem kesehatan - layanan primer	IPP	108402	3701.UAG.00.U21
70	Reformasi sistem kesehatan - layanan rujukan	APD	111612	3701.UAG.00.U21
		AN	108984	3701.UAG.00.U21
		IPP	108399	3701.UAG.00.U21
71	Reviu atas Laporan Verifikasi Konsultan atas Program Hibah Air Limbah Setempat	IPP	114222	3701.UAG.00.U22
72	Reviu atas Laporan Verifikasi Konsultan atas Program Hibah Air Minum Perdesaan	IPP	114221	3701.UAG.00.U22
73	Sistem Kesehatan Nasional	AN	108990	3701.UAG.00.U21
		IPP	108642	3701.UAG.00.U21
74	Skema Kesehatan Adaptif	IPP	108647	3701.FAG.51.028
75	Strategi Pengembangan Daya Saing Pariwisata	APD	112860	3701.UAG.00.U23
		IPP	108805	3701.UAG.00.U23
76	Supply Chain Komoditas Pangan	Investigasi	108631	3701.FAG.51.028
		IPP	114963	3701.FAG.51.028
77	Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	APD	108550	3701.FAG.51.028
78	Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah Pusat	AN	109927	3701.FAG.51.028
79	Transformasi data menuju Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)	Investigasi	114203	3701.FAG.51.028
		IPP	111591	3701.FAG.51.028
80	Verifikasi atas Capaian Disbursement Linked Indicators (DLI) Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri	IPP	114224	3701.FAG.00.U11
	Jumlah	101	106	



**TARGET DAN REALISASI RINCIAN OUTPUT
SD TRIWULAN II TAHUN 2023**

No	Kode	Program/Kegiatan/Rincian Output (RO)	Target RO	Realisasi RO	Nama Topik SHP
1	3701.FAG.028	Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah	23	12	1. Akuntabilitas Pengadaan Logistik dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) 2. Akuntabilitas Pengamanan dan Pengawasan 3. Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu 4. Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Desa 5. Akuntabilitas Aset Desa 6. Bauran Program Kesejahteraan Sosial 7. Efektivitas Pengendalian Inflasi Daerah 8. Pembangunan Satu Data Indonesia (SDI) 9. Penguatan Inovasi dan Teknologi Kesehatan (Digitalisasi Layanan Kesehatan) 10. Penguatan Sistem Pengendalian Penyakit 11. Skema Kesehatan Adaptif 12. <i>Supply Chain</i> Komoditas Pangan
2	3701.FAG.711	Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut	2	2	Perencanaan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan (PAEP dan P3A) Triwulan 1 Perencanaan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan (PAEP dan P3A) Triwulan II
3	3701.FAG.U11	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara, Daerah dan Desa	5	4	1. Akuntabilitas Keuangan Desa 2. Optimalisasi PAD 3. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah 4. Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah
4	3701.FAG.U31	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan dan BLU/BLUD	5	5	1. BLU/D (Fokus pada BLU/D Layanan Kesehatan - Rumah Sakit dan BLU/D Pengelolaan Dana) 2. BUMD (Fokus pada Bank Pembangunan Daerah) 3. BUMD (Fokus pada BU Jasa Air) 4. BUMD (Fokus pada BUMD Aneka Usaha) 5. BUMN
5	3701.UAG.U21	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Sumber Daya Manusia	8	6	1. Akuntabilitas penanganan Covid-19 2. Percepatan Penurunan Stunting 3. Reformasi sistem kesehatan - kualitas dan redistribusi nakes 4. Reformasi sistem kesehatan - layanan primer 5. Reformasi sistem kesehatan - layanan rujukan 6. Sistem Kesehatan Nasional



- UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1:
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
- Silakan pindai kode QR dengan menggunakan aplikasi resmi dari BSR.E untuk memastikan bahwa dokumen ini adalah asli.



No	Kode	Program/Kegiatan/Rincian Output (RO)	Target RO	Realisasi RO	Nama Topik SHP
6	3701.UAG.U22	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Infrastruktur dan Konektivitas	7	7	1. Infrastruktur Jalan Tol 2. Infrastruktur Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) dan Sanitasi 3. Infrastruktur SPAM 4. Pembangunan Bandara 5. Pembangunan Jalan dan Jembatan 6. Pemerataan dan Penyediaan Infrastruktur, Akses Internet dan Komunikasi 7. Program Pembangunan Perumahan Rakyat (Perumahan Khusus dan Rumah Susun, Bantuan Simultan Perumahan Rakyat)
7	3701.UAG.U23	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Ekonomi	6	6	1. Akses Permodalan UMKM 2. Dukungan Pengembangan Pariwisata 3. P3DN 4. Pembangunan Infrastruktur Destinasi Pariwisata (DPSP dan KSPN) 5. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing UMKM 6. Strategi Pengembangan Daya Saing Pariwisata
8	3701.UAG.U24	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan	1	-	
9	3701.UAG.U27	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Daerah	2	2	1. Program <i>Jogja Smart Province</i> (JSP) 2. Program Ekonomi Biru DIY
10	3701.UAG.U41	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Kecurangan	2	1	Pengendalian Kecurangan dan Hambatan Kelancaran Pembangunan
11	3701.UAG.U52	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	7	-	
12	3701.UAG.U53	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	4	-	
Jumlah			72	45	



- UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1:
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
- Silakan pindai kode QR dengan menggunakan aplikasi resmi dari BSR.E untuk memastikan bahwa dokumen ini adalah asli.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Anggaran dan Realisasi Anggaran Per RO s.d. Triwulan II Tahun 2023
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta

No	Kode	Program/Kegiatan/Rincian Output (RO)	Anggaran Th 2023 (Rp)	Realisasi s.d. TW 2 Anggaran (Rp)	%
A	089.01.CH	Program Dukungan Manajemen			
1	3701.FAG.028	Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah	1.058.766.000	213.197.318	20,14
2	3701.FAG.711	Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut	150.000.000	5.320.000	3,55
3	3701.FAG.U11	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara, Daerah dan Desa	278.939.000	117.714.040	42,20
4	3701.FAG.U31	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan dan BLU/BLUD	130.928.000	67.277.348	51,38
5	3701.UAG.U21	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Sumber Daya Manusia	317.520.000	207.494.910	65,35
6	3701.UAG.U22	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Infrastruktur dan Konektivitas	223.432.000	48.727.594	21,81
7	3701.UAG.U23	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Ekonomi	296.352.000	159.069.540	53,68
8	3701.UAG.U24	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan	42.336.000	9.500.000	22,44
9	3701.UAG.U27	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Daerah	115.200.000	63.001.090	54,69
10	3701.UAG.U41	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Kecurangan	109.657.000	30.372.900	27,70
11	3701.UAG.U52	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	802.435.000	33.437.833	4,17
12	3701.UAG.U53	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	105.840.000	48.713.424	46,03
		Jumlah Program Pengawasan	3.631.405.000	1.003.825.997	27,64
B	089.01.WA	Program Dukungan Manajemen			
1	3676.EBA.962	Layanan Umum	547.530.000	163.288.899	29,82
2	3676.EBA.994	Layanan Perkantoran	28.324.142.000	14.315.381.874	50,54
3	3676.EBB.951	Layanan Sarana Internal	100.000.000	99.575.000	99,58
4	3676.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	595.488.000	-	-
		Jumlah Program Dukungan Manajemen	29.567.160.000	14.578.245.773	49,31
		Jumlah	33.198.565.000	15.582.071.770	46,94



• UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1:
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.
 • Silakan pindai kode QR dengan menggunakan aplikasi resmi dari BSrE untuk memastikan bahwa dokumen ini adalah asli.